

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR ISI

1

Kata Pengantar
Sambutan Gubernur

2

Ikhtisar Eksekutif

4-17

Pendahuluan
BAB I

18-25

Perencanaan Kinerja
BAB II

26-63

Akuntabilitas Kinerja
BAB III

64

Penutup
Kesimpulan

68

Lampiran
Penghargaan, Perjanjian Kinerja



ANIES BASWEDAN, PH.D.
GUBERNUR DKI JAKARTA



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, merupakan pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 1180 Tahun 2019 tentang Perjanjian Kinerja, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan fondasi untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai dari Perancangan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diukur dan dinilai oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ini menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2019, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2020. Sangat disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 14 April 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang tertuang dalam KEPGUB. NO. 1180 tahun 2019. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis.

Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Pemprov Provinsi DKI Jakarta Jakarta tahun 2017-2022. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan Program yang dicapai terangkum dalam 10 Sasaran Strategis. Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu:

- 7 (tujuh) Indikator tercapai targetnya;
- 5 (lima) indikator yang melebihi 90% realisasi capaian;
- 1 (satu) indikator masih dalam proses

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan 35 program prioritas. Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemprov Provinsi DKI Jakarta Jakarta di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	NO	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,4	80,76	100,4%
2	Berkurangnya Tingkat Pengangguran	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,1%	5,13%	99,42%
3	Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	3	Indeks Ketahanan Pangan			101,2%
			1. Ketersediaan	100%	100%	
			2. Skor PPH	82	83	
4	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan Bagi Seluruh Masyarakat	4	Tingkat Kemiskinan	3,38	3,42	98,83%
5	Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi	5	Jumlah titik genangan banjir	7 Titik	5 Titik	140%
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	6	Cakupan pelayanan air bersih	63,65%	63,16%	99,23%
		7	Persentase penurunan volume sampah di kota	17,00%	17,08%	100,5%
7	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau Bagi Semua Warga Jakarta	8	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (Transportation Modal Share)	22%	21,7%	98,64%
8	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	9	Realisasi Nilai Investasi	100,20 Triliun Rupiah	123,90 Triliun Rupiah	123,7%
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	10	Nilai / Predikat AKIP	A (81)	BB (73,8)	91,16%
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,41	101,7%
		12	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Proses	Proses
10	Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi dan Berkelanjutan, Berikut Sarana Prasarana Pendukungnya	13	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	221 RW	157 RW	140%

An aerial photograph of a city skyline at dusk. The sky is filled with soft, grey clouds. The city below is densely packed with skyscrapers and residential buildings. In the foreground, a road with a white railing curves through a dark, wooded area. The overall color palette is dark and moody, with a blue-grey tint.

BAB I



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

Berikut Dasar Hukum yang Menjadi Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta:

UU RI No. 23 Th 2014
tentang Pemerintah Daerah

PP No 29 Th 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Permen PAN dan RB Nomor
53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas
LKIP

Kepgub No. 1180 Th 2019
tentang Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2019

Ingub No. 90 Th 2019
tentang Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2019

TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

1

Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2019.

2

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

MANFAAT



Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.



Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.



Sebagian bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

OVERVIEW PROVINSI DKI JAKARTA

KEDUDUKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Kedudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.(berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

KONDISI PEMERINTAHAN

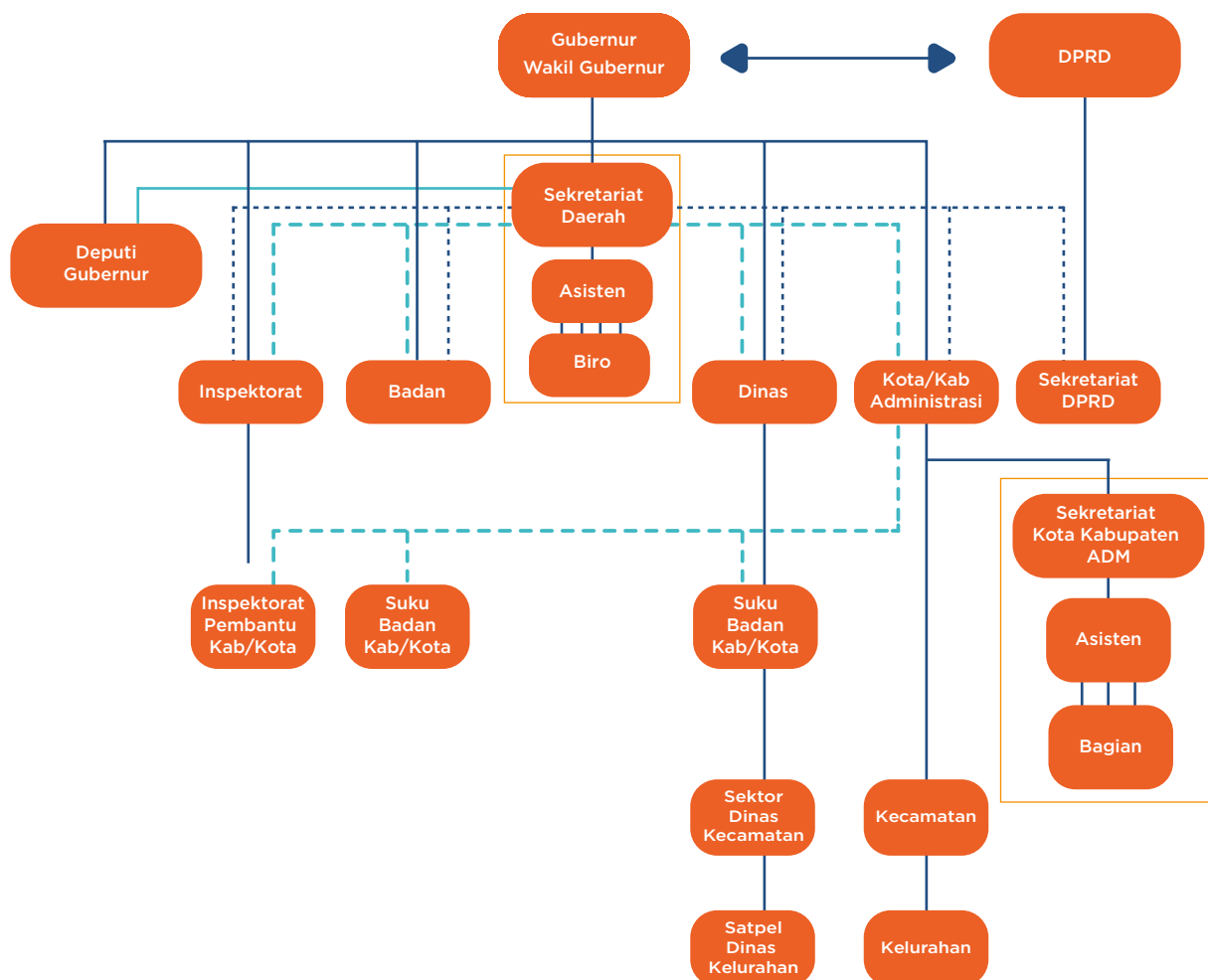
Sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Reformasi Birokrasi, berikut penataan ulang organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 4 Asisten, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas, 10 Badan, 5 Kota Administrasi, dan 1 Kabupaten Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Susunan kelembagaan tersebut efektif dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017 hingga sampai saat ini. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:



TUGAS POKOK & FUNGSI

Menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah serta kekhususannya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Satpol PP.



Sekretariat Daerah

Tugas:

Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur Daerah;
5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
7. Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan Perangkat Daerah;
8. Penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah, dan protokol;
9. Fasilitasi dan pengoordinasian fungsi

perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Memiliki:

4 (empat) orang Asisten yang mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup serta Kesejahteraan Rakyat.



2. Badan

Dipimpin:

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas:

Melaksanakan tugas Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, meliputi;

1. Perencanaan,
2. Keuangan,
3. Kepegawaian,
4. Pendidikan dan Pelatihan,
5. Penelitian dan Pengembangan, dan
6. Fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya.



3. Sekretariat DPRD

Tugas:

Menyelenggarakan seluruh administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dipimpin:

1 orang Sekretaris, yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



4. Inspektorat

Tugas:

Mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah.

Dipimpin:

Satu orang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah



5. Dinas

Dipimpin:

Kepala Dinas atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Tugas:

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, meliputi urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan.



6. Kota/Kabupaten Administrasi

Dipimpin:

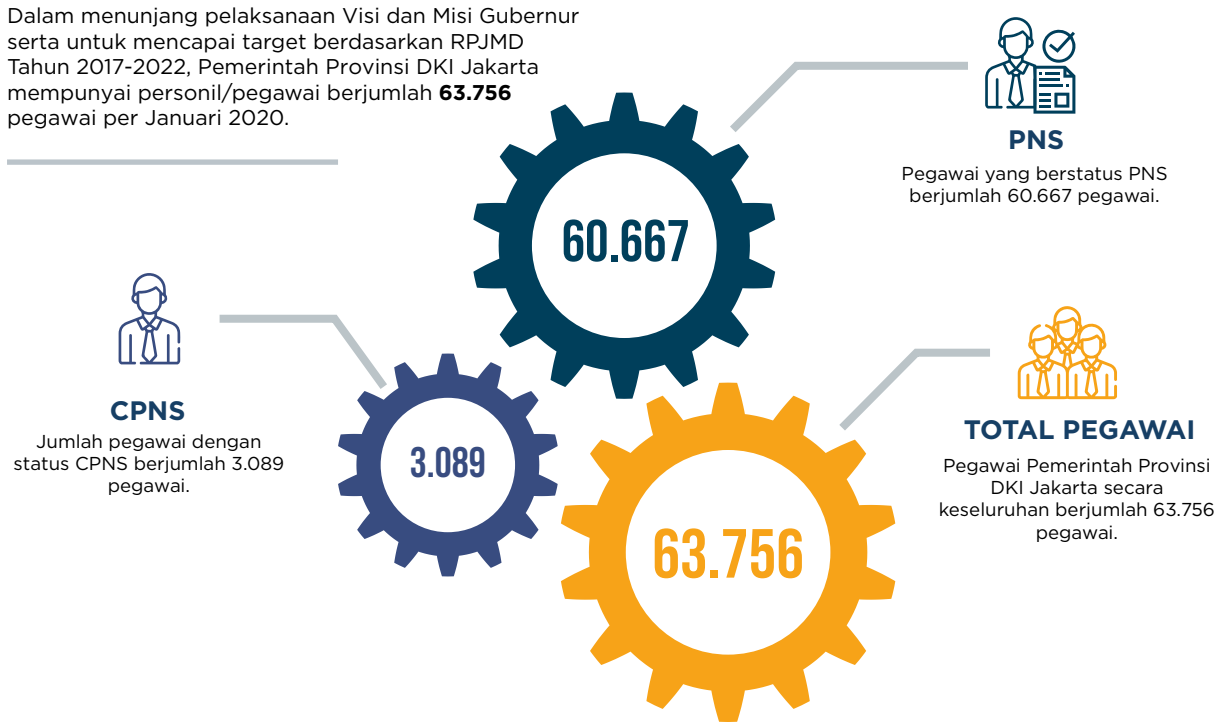
Walikota/Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas:

Membantu tugas Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, membina 44 kecamatan dan 267 kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

PERSONIL/PEGAWAI PEMERINTAH DKI JAKARTA

Dalam menunjang pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai personil/pegawai berjumlah **63.756** pegawai per Januari 2020.

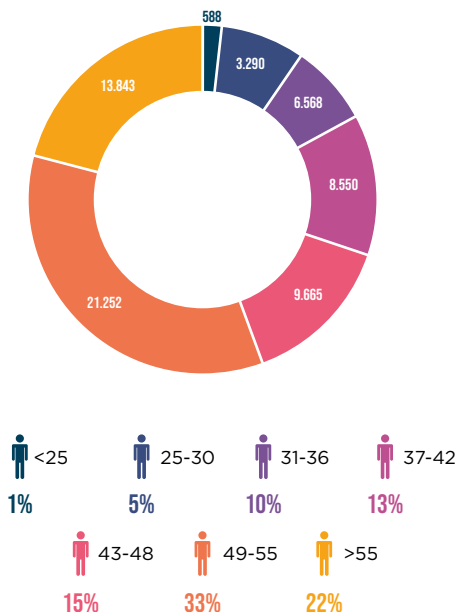


Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

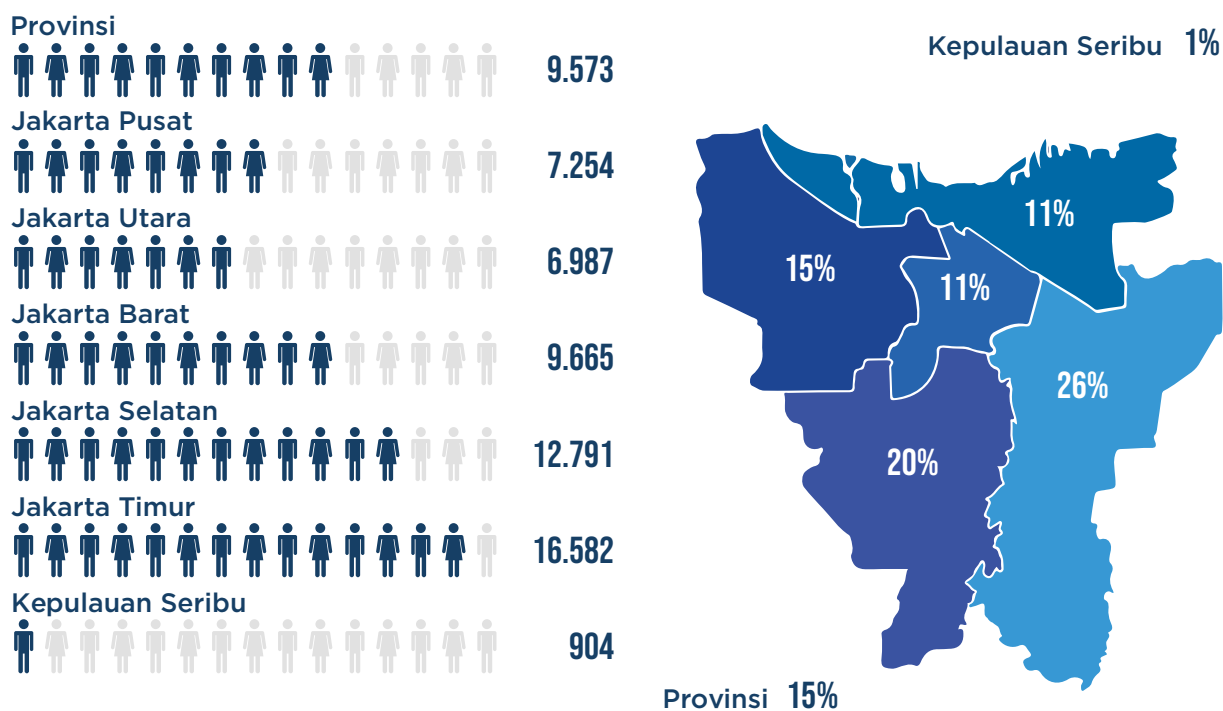


Per-Januari 2020 jumlah pegawai laki-laki mengalami penurunan lebih sedikit yaitu sebanyak 29.533 orang dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan sebanyak 34.223 orang.

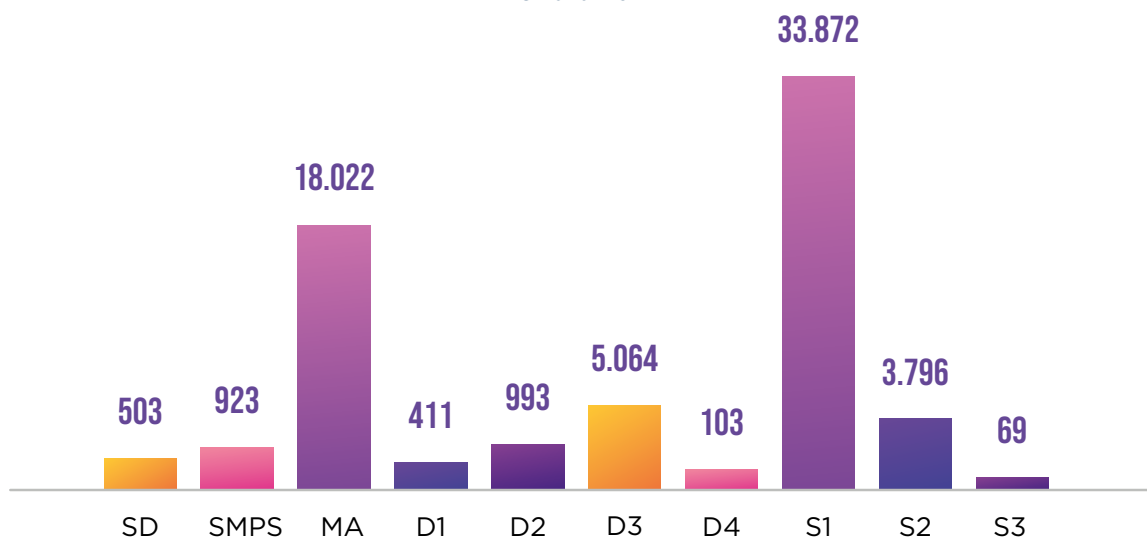
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan Tugas



Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan di antaranya:

<p>①</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>②</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management.</p>
<p>③</p> <p>Peraturan Gubernur Daerah Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik.</p>	<p>④</p> <p>Peraturan Gubernur Daerah Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera.</p>
<p>⑤</p> <p>Peraturan Gubernur Daerah Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.</p>	<p>⑥</p> <p>Peraturan Gubernur Daerah Nomor 126 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah.</p>
<p>⑦</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.</p>	<p>⑧</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>

Selain itu, untuk mewujudkan reformasi birokrasi, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan capaian yang baik sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dalam bentuk kegiatan yang strategis. Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, antara lain:

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada 7 UPD; Ditetapkannya MPP Dinas PM dan PTSP, UPPKB Pulogadung, PPISHP, RSUD Pasar Minggu, dan UPPKB Ujung Menteng sebagai Unit Kerja Zona Integritas berpredikat WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB; Peningkatan dan pengembangan SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan) dalam mengelola penerimaan pendapatan daerah; Penguatan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga melalui 13 (tiga belas) kanal pengaduan yang terintegrasi sehingga aduan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat; dan Semua pembayaran retribusi perizinan dan non-perizinan melalui transaksi nontunai untuk menghindari pungutan liar (pungli).

Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi Efektif dan Efisien, antara lain:

Evaluasi kelembagaan terhadap perubahan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Hal-hal yang sudah dicapai dengan, baik secara terus menerus agar dipelihara dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan sehingga menghasilkan perubahan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

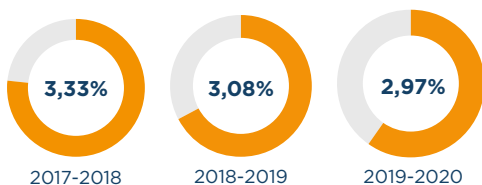
Penyusunan Peta Proses Bisnis pada PD dan monitoring serta evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PD/UPD; Proses pengajuan ulang validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB terkait kelas jabatan; Pengembangan Sistem Informasi Jakarta Peduli (SiJali) terkait pemuktakhiran data kemiskinan; dan Menerapkan sistem E-Order pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah sebagai dukungan pada UKM.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas, antara lain:

Monitoring dan evaluasi standar pelayanan di UPD terutama di kelurahan, kecamatan dan PTSP; Integrasi aplikasi perizinan-perizinan seperti Si Tatan (SIUP TDP Simultan 6 Jam), Pelitas (perizinan lintas batas) dan website ke dalam satu kanal perizinan yaitu aplikasi JakEvo; Pengembangan Sistem Integrasi Layanan Kependudukan (Sidukun3in1) dan Pelayanan terintegrasi dokumen kependudukan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan (Dokter Perkasa); Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 yaitu 84,41 yang melebihi dari target 83,00; Penunjukan Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mempercepat proses pembuatan dokumen kependudukan; dan Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di seluruh Kelurahan oleh Pejabat Pencatatan Sipil (PPS), sehingga pelayanan administrasi kependudukan (Akta kelahiran dan KK) selesai dalam 1 jam atau maksimal 24 jam.

KONDISI PEREKONOMIAN

INFLASI

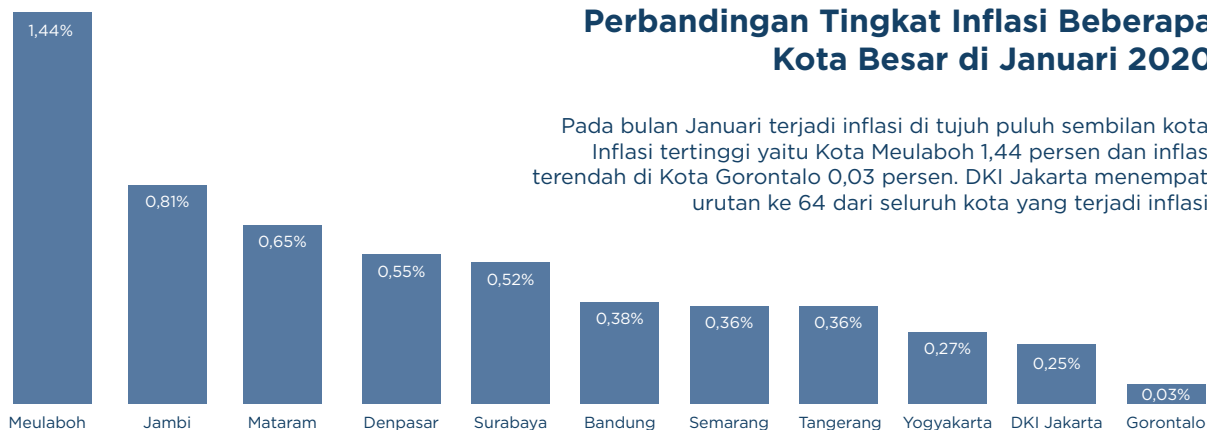
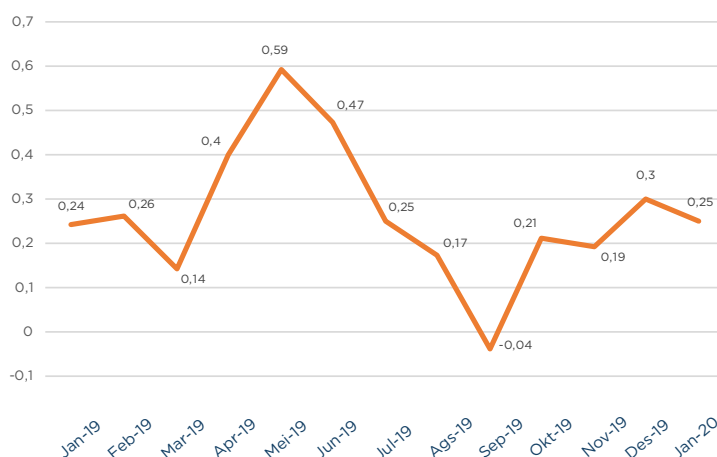


Tingkat Inflasi DKI Jakarta Tahun ke Tahun

Laju inflasi Januari 2020 terhadap Januari 2019 di DKI Jakarta 2,97 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi periode yang sama pada tahun sebelumnya masing-masing sebesar 3,08 persen dan 3,33 persen.

Tingkat Inflasi DKI Jakarta Januari 2019 - Januari 2020 (persen)

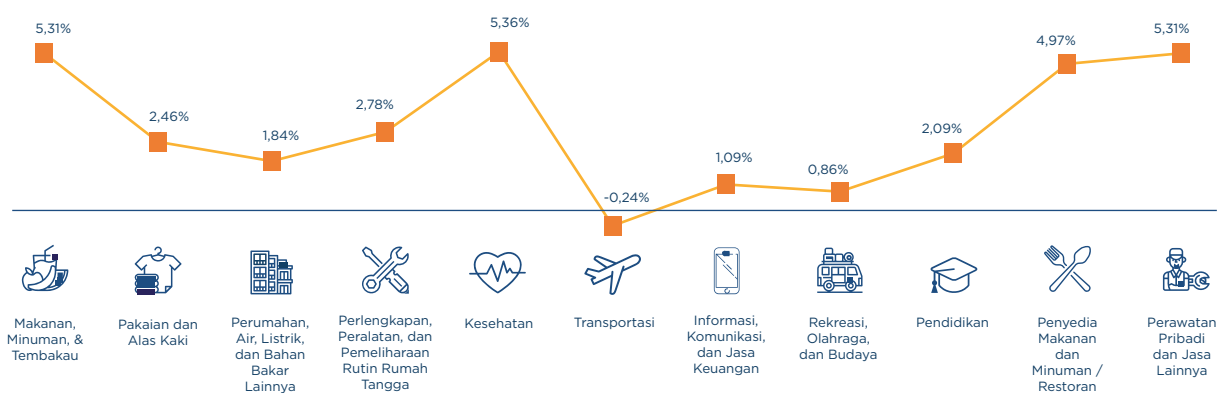
Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2020 sebesar 0,25 persen Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2019 sebesar 0,24 persen.



Perbandingan Tingkat Inflasi Beberapa Kota Besar di Januari 2020

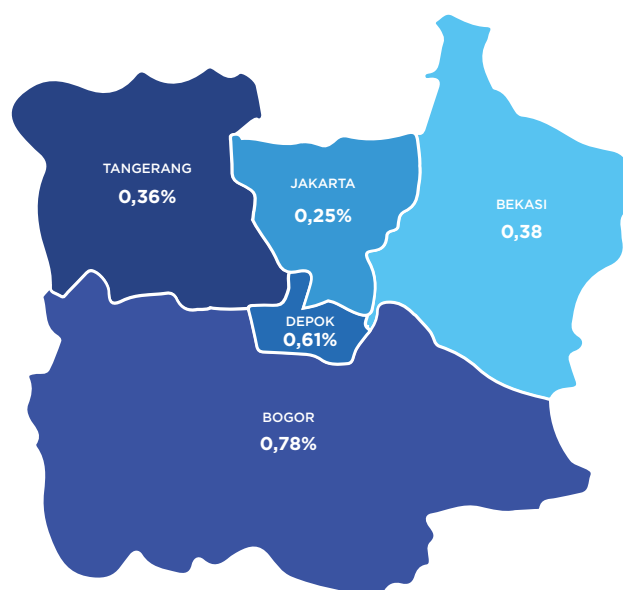
Pada bulan Januari terjadi inflasi di tujuh puluh sembilan kota. Inflasi tertinggi yaitu Kota Meulaboh 1,44 persen dan inflasi terendah di Kota Gorontalo 0,03 persen. DKI Jakarta menempati urutan ke 64 dari seluruh kota yang terjadi inflasi.

Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (dari Tahun 2019 ke Tahun 2020)



Perbandingan Tingkat Inflasi Januari 2020 JABODETABEK

Inflasi juga terjadi pada seluruh Kota Satelit DKI Jakarta yaitu Kota Bogor inflasi sebesar 0,78 persen, Kota Depok 0,61 persen, Kota Bekasi 0,38 persen, dan Kota Tangerang 0,36 persen.



EKSPOR

Melalui DKI Jakarta

54,03 Milyar US\$ **0,83%** ▼

Secara kumulatif, nilai ekspor melalui DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 54,04 milyar US\$, nilai ini turun 0,83 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 54,5 milyar US\$.

Barang Asal DKI Jakarta

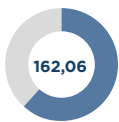
5,42% ▲ **10,48** Milyar US\$

Tahun 2019, ekspor barang asal DKI Jakarta mencapai 10,48 milyar US\$ meningkat 5,42 persen dibanding tahun 2018 sebesar 9,94 milyar US\$.

Komoditi Unggulan (dalam Juta US\$)



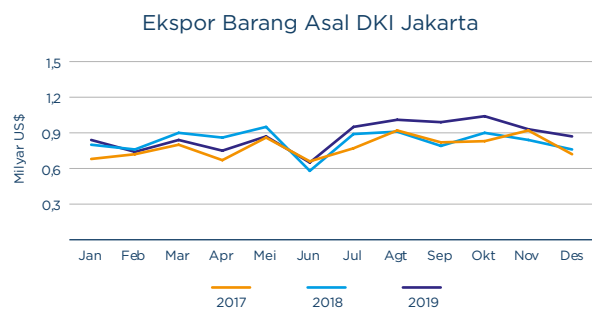
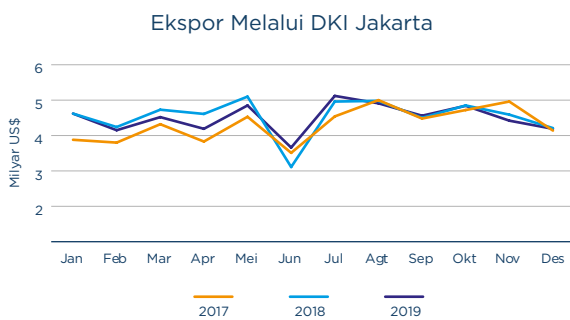
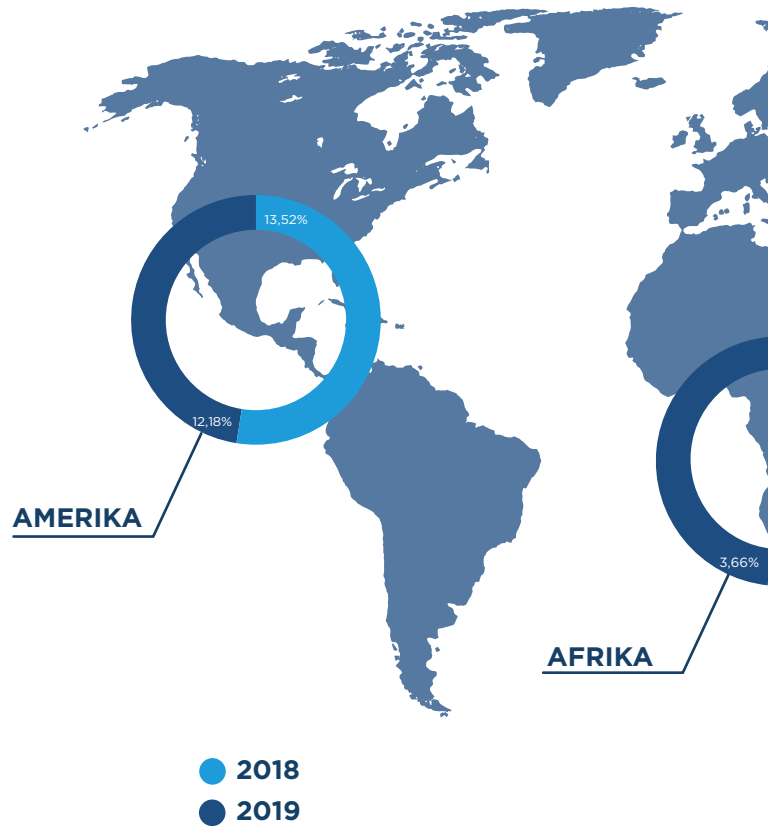
Kendaraan dan Bagiannya



Perhiasan dan Permata



Ikan dan Udang



Catatan: "Angka ekspor nasional tahun 2019 meningkat 6,94 persen dibanding 2018. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019, sebagian barang ekspor, khususnya barang produksi dari provinsi lain, yang biasanya diekspor melalui pelabuhan muat Jakarta, mungkin beralih diekspor melalui pelabuhan lain".

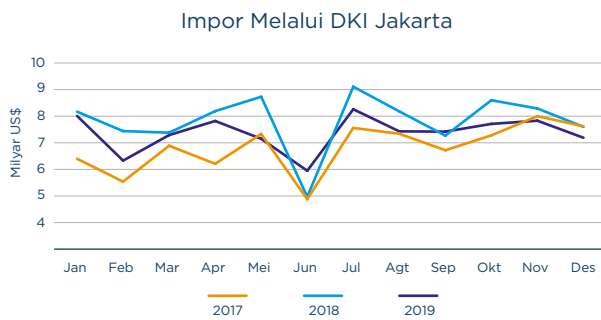
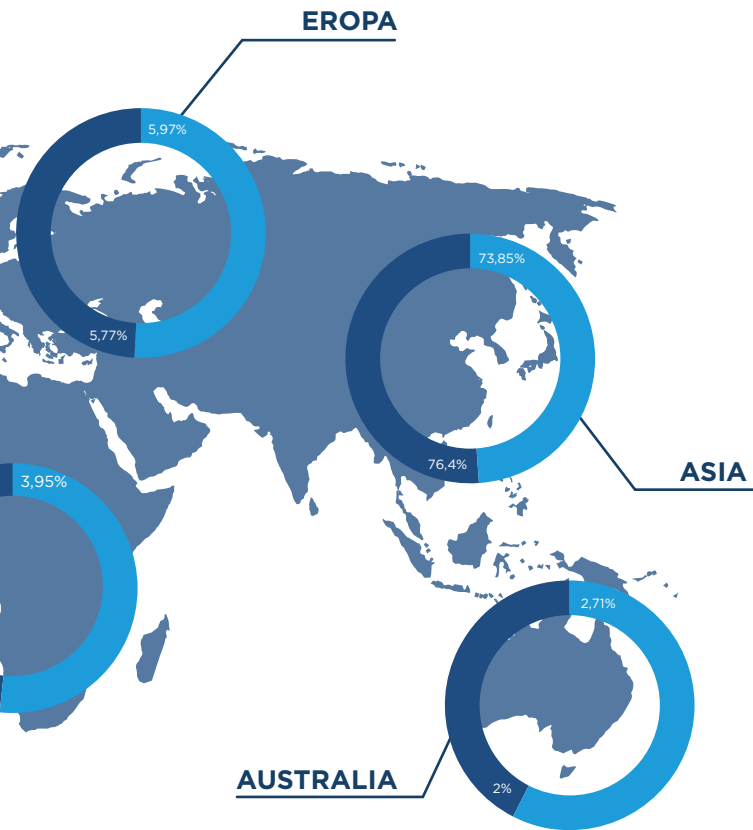
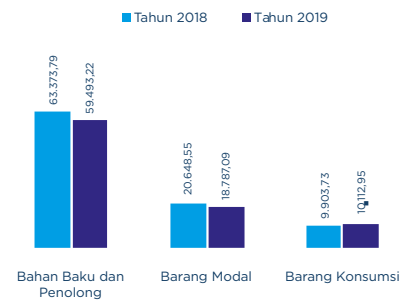
IMPOR

Melalui DKI Jakarta

88,3 Milyar US\$ **5,89%** ▼

Selama tahun 2019, nilai impor melalui DKI Jakarta mencapai 88,3 milyar US\$ turun 5,89 persen terhadap total impor tahun 2018 sebesar 99,93 US\$.

Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang 2018 - 2019 (Juta US\$)





BAB II



PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 -2022

Perencanaan Kinerja merupakan janji rencana kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian Kinerja itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 adalah sasaran dan target kinerja yang mengacu pada:



Pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sasaran Strategis akan dijadikan tolok ukur dalam ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi Gubernur pada tahun 2019.

Visi, Misi & Tujuan Strategis

VISI

“

**Jakarta Kota
Maju, Lestari dan
Berbudaya yang
Warganya terlibat
dalam Mewujudkan
Keberadaan, Keadilan
dan Kesejahteraan
bagi Semua.**

”

Keberadaan, Keadilan dan Kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

MISI

Berikut rumusan misi upaya - upaya untuk pembangunan daerah yang akan ditempuh:

1

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreatifitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

2

Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

3

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

4

Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

5

Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Menjadikan Jakarta Kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiasikan.

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kota Jakarta yang Aman, Tertib dan Inklusif.	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial Terwujudnya pembangunan kota yang mengutamakan kesetaraan gender serta ramah perempuan dan anak Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh bencana
Mewujudkan Manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya.	Terjaminnya Akses dan layanan pendidikan serta kesehatan yang berkualitas bagi semua Terwujudnya keluarga yang sejahtera

Misi 2:

Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesempatan kerja	Berkurangnya tingkat pengangguran.
Meningkatnya kewirausahaan yang kreatif dan produktif	Meningkatnya kewirausahaan baru.
Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas dan berkelanjutan	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat.
Mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat	Terwujudnya pengurangan tingkat kesenjangan sosial masyarakat. Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat.
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.
Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi.
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Misi 3:

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat

Misi 4:

Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Melambatnya penurunan muka air tanah Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, beriklim sehat dan sarana prasarana pendukungnya

Misi 5:

Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Tujuan	Sasaran
Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambing kemajuan pembangunan di Indonesia	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama dan ras dan latar belakang lainnya
Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80.40

Sasaran Strategis 2

Berkurangnya tingkat pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	5.10%

Sasaran Strategis 3

Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.1 Indeks Ketahanan Pangan	Persentase	Ketersediaan 100%
	Skor	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 82

Sasaran Strategis 4

Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1 Tingkat Kemiskinan	Persentase	3.38%

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1 Jumlah titik genangan banjir	Titik	7 titik

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya akses sanitasi layak

Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1 Cakupan pelayanan air bersih	Persentase	63.65%
6.2 Persentase penurunan volume sampah di kota	Persentase	17.00%

Sasaran Strategis 7

Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta

Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1 Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase	22%

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya pertumbuhan investasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1 Realisasi Nilai Investasi	Triliun	Rp. 100.20 triliun

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Satuan	Target
9.1 Nilai/Predikat AKIP	Predikat	Predikat A
9.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83.00
9.3 Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP

Sasaran Strategis 10

Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

Indikator Kinerja	Satuan	Target
10.1 Jumlah kawasan pemukiman kumuh	RW	221 RW

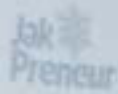
Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai APBD tahun 2019 sebesar Rp. 66.029.983.254.737,- adapun yang digunakan untuk melaksanakan program-program terkait Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Miliar Rupiah)
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	159
2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	15.416
3	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	221
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	757
5	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	8.660
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	11.398
7	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	61,4
8	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	25,5
9	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	38,04
10	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	1.426
11	Program Pemberdayaan Masyarakat	257
12	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	2.938
13	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1.608
14	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan	1.005
15	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1.429

NO	PROGRAM	PAGU (Miliar Rupiah)
16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	1,56
17	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	359
18	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	4,77
19	Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan	12,7
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	425
21	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	501
22	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	424
23	Program Penangan Fakir Miskin	674
24	Program pengendali Banjir dan Abrasi	3.313
25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	109
26	Program Pengelolaan Persampahan	2.617
27	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	1.799
28	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	431
29	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	522
30	Program Peningkatan Penanaman Modal	38,3
31	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	7,81
32	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0,11
33	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	169
34	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,68
35	Program Penataan Kawasan Permukiman	3.615



BAB III



PEHYERAHAN BANTUAN USAHA BAGI UMKM BINAAN PENERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA DARI MAYAPADA GROUP
IM RANGKA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAKPRENEUR

Jakarta, 21 Februari 2020

AKUNTABILITAS KINERJA

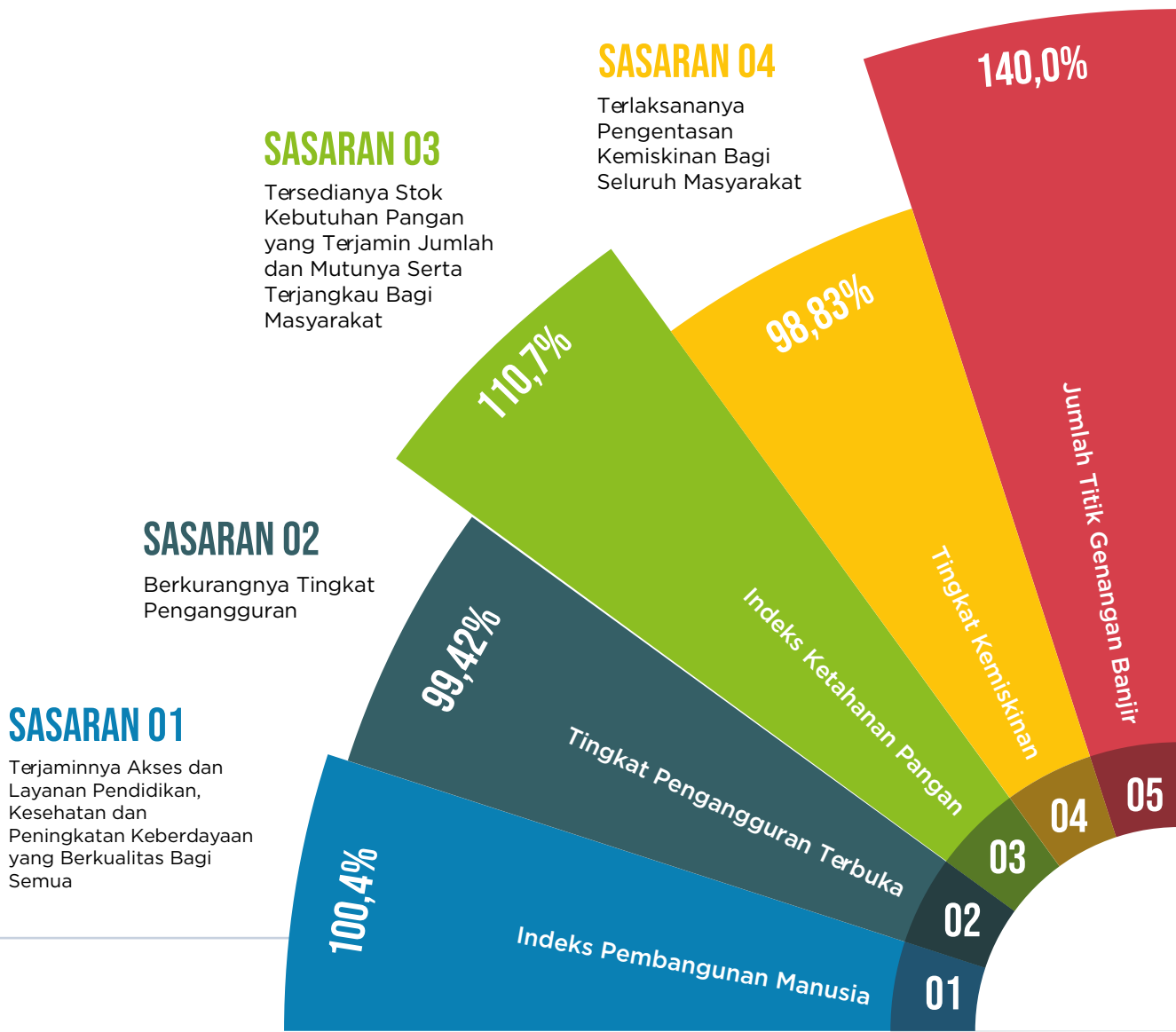
CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian keberhasilan kinerja menjadi tolak ukur realisasi program pemerintah yang telah ditetapkan dalam KEPGUB NO/1080/2018

tentang perjanjian kinerja SKPD Pemprov DKI Jakarta tahun 2019.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai 10 sasaran strategis yang diukur dalam 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan akhir tahun 2019. Nilai Akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target sasaran strategis yang tercapai.

Grafik Presentase Capaian Kinerja



SASARAN 06

Meningkatnya Akses Sanitasi Layak

SASARAN 07

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau

SASARAN 08

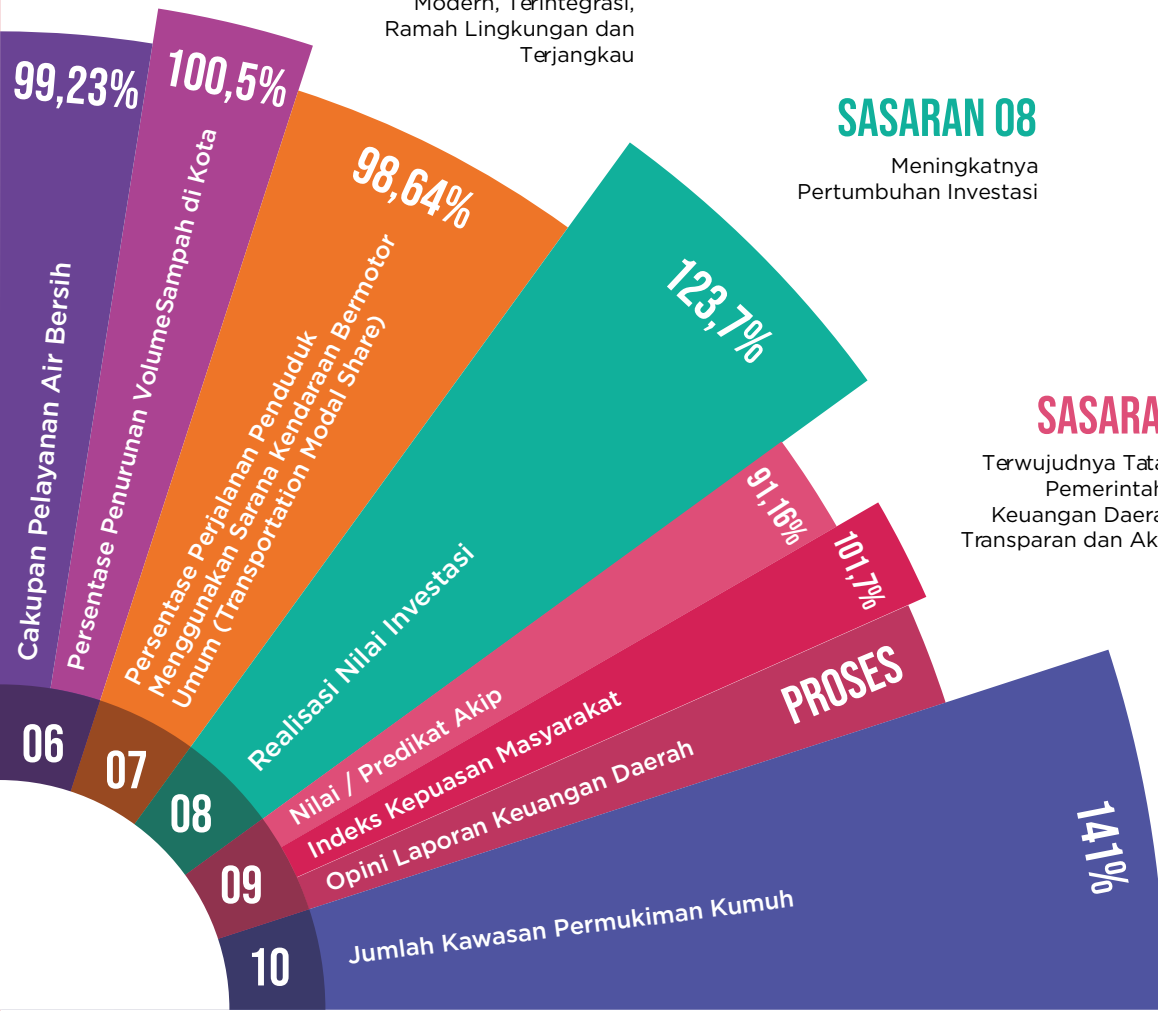
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

SASARAN 09

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

SASARAN 10

Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi Dan Berkelanjutan, Berikut Sarana Prasarana Pendukungnya



SASARAN 1

Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua

Indeks Pembangunan Manusia

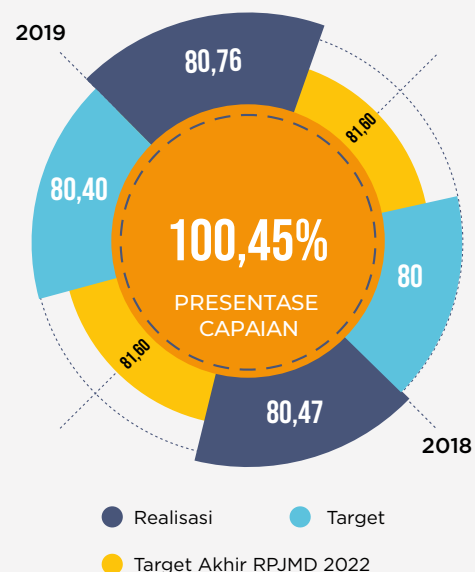
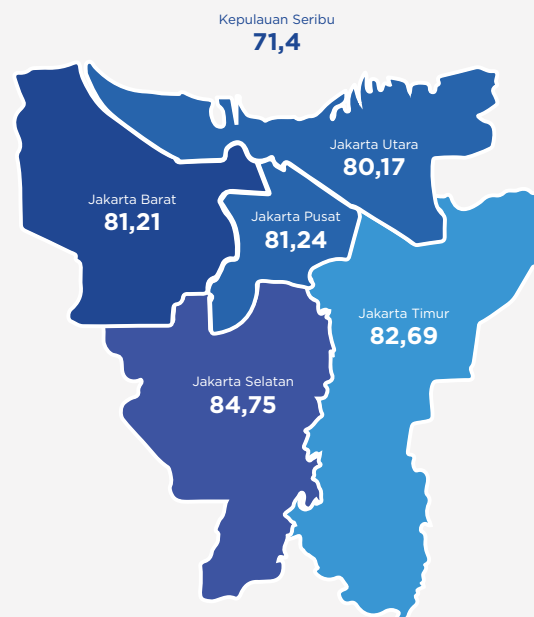
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Penduduk bisa dikatakan berkualitas jika berkontribusi untuk kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan sebagai alat ukur kualitas pembangunan sumber daya manusia yang relevan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari capaian kinerja program terkait sasaran “Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua” yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah, diantaranya:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta yang telah mencapai 80,47. Angka IPM tersebut naik sebesar 0,41 poin atau 0,51 persen dibandingkan IPM tahun 2018 yang sebesar 80,06.

Sejak tahun 2017, status IPM DKI Jakarta telah masuk ke level “Sangat Tinggi”, yaitu status IPM dengan passing grade sebesar 80,00. Pencapaian IPM tersebut sekaligus.

Angka IPM Menurut Wilayah DKI Jakarta Tahun 2019



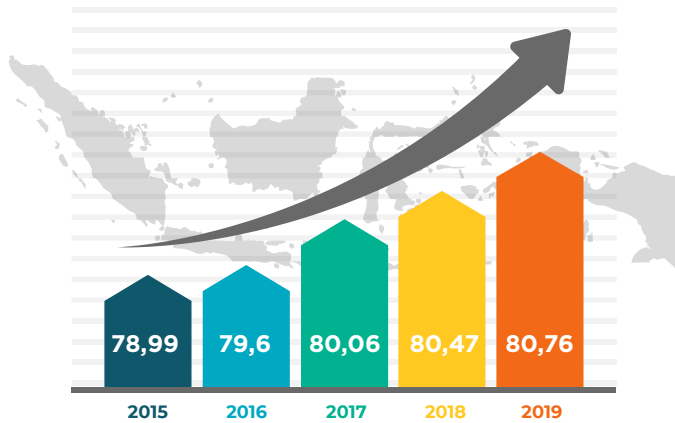
**Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia**

mempertahankan posisi DKI Jakarta sebagai peringkat IPM tertinggi diantara 34 Provinsi di Indonesia. Bahkan secara total, angka IPM DKI Jakarta berada cukup jauh di atas IPM Indonesia, yaitu sebesar 71,39.

Seluruh komponen pembentuk IPM tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72,79 tahun, meningkat dari 72,67 tahun. Angka harapan lama sekolah

mencapai 12,97 tahun, meningkat dari 12,86 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 11,06 tahun, meningkat dari 11,05 tahun. Pengeluaran per kapita mencapai 18,53 juta rupiah dari 18,13 juta rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 2015-2019



Pertumbuhan IPM Per Komponen 2018-2019

Usia Harapan Hidup

+ 0,17 %

Angka Harapan Lama Sekolah

+ 0,15 %

Angka Rata-rata Lama Sekolah

+ 0,09 %

Pengeluaran Perkapita yang D disesuaikan

+ 2,20 %

Perbandingan Nilai IPM Tahun 2019

Rank.	Daerah	Nilai
1	DKI Jakarta	80,74
2	DI Yogyakarta	79,99
3	Kalimantan Timur	76,61
4	Kep. Riau	75,48
5	Bali	75,38
34	Papua	60,84
	IPM Indonesia	71,92

**72,79
Tahun**

Usia Harapan Hidup

**12,97
Tahun**

Angka Harapan Lama Sekolah

**11,06
Tahun**

Angka Rata-rata Lama Sekolah

**Rp 18,53
Juta**

Pengeluaran Perkapita yang D disesuaikan

Keberhasilan atas capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia didukung oleh pelaksanaan program - program pendukung yang terdapat pada beberapa instansi terkait. Adapun instansi, besaran anggaran, dan program tersebut antara lain, sebagai berikut:

Jumlah Instansi
5 Instansi

Jumlah Program
16 Program

Total Anggaran yang Digunakan
14.081 Miliar Rupiah

Dinas Pendidikan

Program Pendukung

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Upaya yang dilakukan:

Untuk mengatasi hal angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang masih rendah, selama ini telah dilakukan berbagai upaya dari pemerintah seperti membangun gedung sekolah baru dengan harapan dapat menampung lebih banyak siswa. Selain itu pemerintah juga melakukan sosialisasi minat belajar di PAUD, sosialisasi wajib belajar 12 tahun pengadaan taman baca, pemberian bimbingan belajar serta pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini juga merupakan solusi atas permasalahan rendahnya tingkat partisipasi sekolah dari persepsi lain selain segi ekonomi.

Realiasi Anggaran Program

6.271 Miliar Rupiah

Permasalahan:

Permasalahan dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS), salah satunya adalah tingkat partisipasi sekolah kelompok anak usia 16-18 tahun. Pada usia ini, seorang anak diharapkan masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) namun kenyataannya banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, serta partisipasi pendidikan kelompok anak usia 13-15 tahun merupakan bahan evaluasi atas pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang harus ditindak lanjuti dengan serius.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Pendukung

Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

Realiasi Anggaran Program

76 Miliar Rupiah

Permasalahan:

Secara keseluruhan, minat masyarakat DKI Jakarta dalam membaca buku masih terbilang kecil meskipun fasilitas-fasilitas sudah tersedia dan tersebar di beberapa tempat di Jakarta.

Upaya yang Dilakukan:

Melakukan inovasi-inovasi kegiatan untuk mendorong peningkatan kegemaran membaca, seperti pelaksanaan Baca Jakarta yang dilaksanakan di RPTRA dan TBM di masing-masing wilayah kota sampai tingkat provinsi dengan melibatkan relawan penggiat literasi dan anak-anak Jakarta

Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Pendukung

Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Realiasi Anggaran Program

1.293 Miliar Rupiah

Permasalahan:

Permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adanya efisiensi anggaran yang kurang tepat sehingga beberapa kegiatan pendukung program tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan:

Menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas. Dari hasil inventarisasi tersebut, kemudian direalisasikan dalam bentuk kegiatan berdasarkan skala prioritas dengan berpedoman pada efektivitas anggaran.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Program Pendukung

Program Pemberdayaan Masyarakat

Realiasi Anggaran Program

250 Miliar Rupiah

Dalam pelaksanaan program, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tidak menjumpai permasalahan signifikan dalam melaksanakan program pendukung indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Dinas Kesehatan

Program Pendukung

Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan

Realiasi Anggaran Program

6.287 Miliar Rupiah

Permasalahan:

Permasalahan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program adalah terbatasnya fasilitas, tenaga, dan material dan anggaran.

Upaya yang dilakukan:

Menyusun skala prioritas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan memilih melaksanakan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien.

SASARAN 2

Berkurangnya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama Tahun 2019 keadaan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Selama periode Februari 2018 - Februari 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,34 persen menjadi 5,13 persen, atau turun sebesar 0,21 persen poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami penurunan dari 5,85 persen menjadi 4,58 persen (turun 1,27 persen poin), sementara TPT perempuan mengalami peningkatan dari 4,59 persen menjadi 5,94 persen (naik 1,36 persen poin).

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 7,82 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,31 persen. Dengan kata lain, terdapat penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK.

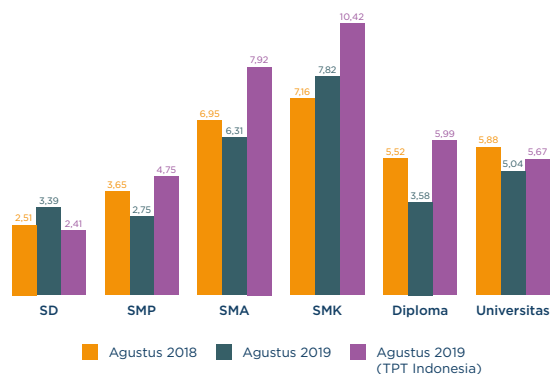
Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja sehingga TPT relatif rendah. Hal ini terlihat dari TPT untuk mereka yang berpendidikan SMP yaitu 2,75 persen, merupakan yang terendah di antara semua tingkat pendidikan. Sedangkan TPT untuk mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu 3,39 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT mengalami peningkatan hanya pada dua jenjang pendidikan, yaitu SD ke bawah (naik 0,88 persen poin) dan SMK (naik 0,66 persen poin).

Penurunan TPT tertinggi terdapat pada mereka yang berpendidikan Diploma I/II/III, turun sebesar 1,94 persen poin. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami

penurunan sebesar 0,58 persen poin, yaitu dari 69,27 persen pada Februari 2018 menjadi 68,69 persen pada Februari 2019. TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,95 persen poin, yaitu dari 83,26 persen pada Februari 2018 menjadi 82,31 persen pada Februari 2019. TPAK perempuan juga mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin, yaitu dari 55,39 persen pada Februari 2018 menjadi 55,20 persen pada Februari 2019.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Pendidikan (persen) Tahun 2018 - 2019



Berdasarkan pengukuran kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab utama sebagai sebuah organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk merealisasikan target yang diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan beberapa program pendukung, yaitu:

Program Pendukung

- Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
- Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis
- Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan

2. Mengupayakan penciptaan kesempatan kerja baru, baik dari sektor formal maupun informal,
3. Meningkatkan sosialisasi baik melalui media elektronik, media massa serta upaya memfasilitasi dan mempertemukan antara pengguna tenaga kerja (perusahaan) dan pencari kerja melalui event, antara lain Job Fair.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 masih dihadapkan pada berbagai masalah yang cukup berat. Namun, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tetap berusaha untuk melaksanakan kinerjanya semaksimal mungkin.

Total Anggaran yang Digunakan

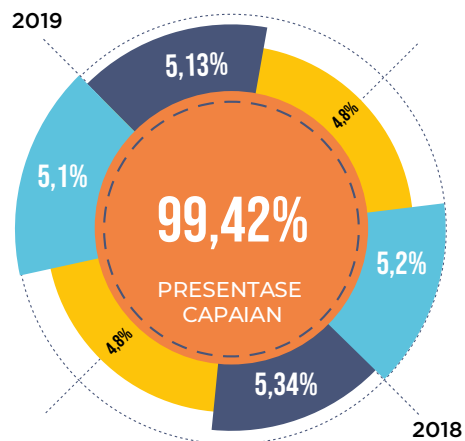
67 Miliar Rupiah

Permasalahan:

Terdapat hambatan - hambatan dan permasalahan yang masih dirasakan dan perlu mendapat perhatian atau kegiatan dalam pelaksanaan tugas baik yang bersifat pembangunan fisik maupun perencanaan.

Upaya yang dilakukan:

1. Mengupayakan penambahan kuantitas dan kualitas Pegawai Fungsional tertentu diantaranya Fungsional Pengantar Kerja, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Instruktur di Pusat Pelatihan Kerja yang mendukung dan menentukan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta,



● Realisasi ● Target
● Target Akhir RPJMD 2022

Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

SASARAN 3

Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya Serta Terjangkau Bagi Masyarakat

Indeks Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran tersebut dapat diukur dari indikator indeks ketahanan pangan yang terdiri dari persentase ketersediaan pangan, dan skor pola pangan harapan. Indikator ketersediaan pangan yang dituangkan dalam RPJMD hanya dibatasi pada pangan strategis, yaitu pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan sangat mempengaruhi inflasi daerah.

Ketersediaan Pangan

Sasaran Terwujudnya Ketersediaan Pangan dilaksanakan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pangan. Pada tahun 2019, target ketersediaan pangan ditetapkan dengan presentase sebesar 100%. Target tersebut berhasil dicapai dengan capaian sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. Sehingga persentase capaian kinerja program mencapai 100% dengan evaluasi berpredikat sangat baik.



Ketersediaan pangan pada tiga tahun terakhir berhasil mencapai 100% menggambarkan bahwa pangan yang tersedia melebihi kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta.

Hal ini untuk menjamin setiap penduduk DKI Jakarta dapat mengakses pangan baik dari segi fisik maupun ekonomi. Akses secara fisik artinya pangan tersedia dan terjangkau secara fisik oleh masyarakat, sementara akses secara ekonomi menggambarkan pangan tersedia secara visi dan dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Target Kebutuhan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

No	Komoditas	Target Pangan (Kg/Kp/Th)	Realisasi Kebutuhan Pangan (Kg/Kp/Th)	Ketersediaan (Kg/Kp/Th)	%
1	Beras	88,6	94,9	220,31	232,1
2	Daging Ruminansia	11,4	7,7	18,51	240,4
3	Daging Unggas	19,5	11,35	32,85	289,4
4	Telur	6,6	8,98	21,39	238,2
5	Susu	13,5	6,35	30,47	479,8
6	Ikan	14,5	24,05	26,46	110
7	Gula	8,2	5,4	31,58	584,8
8	Sayur	47,5	55,01	71,51	130
9	Buah	37,6	37,85	49,21	130

Meskipun produksi pangan di DKI Jakarta sangat minim untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, tetapi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta para stakeholdernya, kebutuhan pangan dapat terpenuhi lebih dari 100%. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk diantaranya:

- Peningkatan produksi pertanian, dilakukan dengan program Urban Farming atau pertanian perkotaan, peningkatan produksi peternakan dengan meningkatkan produksi susu, dan peningkatan produksi perikanan dengan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

- Penguatan Badan Usaha Milik Daerah yang mengurus pangan meliputi PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Ketiga BUMD inilah yang aktif melakukan usaha baik trading (perdagangan), kerja sama penyediaan pangan maupun mendukung program-program ketahanan pangan.
- Kerja sama penyediaan pangan, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah mitra dalam bentuk MoU. Kemudian proses bisnisnya ditindaklanjuti oleh BUMD.
- Kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga pasokan dan ketersediaan pangan. Diantara kebijakan pemerintah pusat yang terkait langsung dengan ketersediaan pangan di DKI Jakarta adalah kuota impor pangan dan penetapan harga acuan untuk pangan strategis.

Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencakupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu suatu pangan penduduk berdasarkan skor pangan. Semakin tinggi skor pangan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) telah disepakati pada tingkat nasional berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) X tahun 2012 sebagai acuan dalam pembangunan pangan dan gizi. Angka Kecukupan Energi (AKE) di tingkat konsumsi sebesar 2.150 Kkal/kap/hari, dan 2.200 Kkal/kap/hari di tingkat ketersediaan. Sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) di tingkat konsumsi adalah sebesar 52 gram/kap/hari,

dan 57 gram/kap/hari di tingkat ketersediaan (Balitwati,2015).

Berdasarkan Susenas 2013 - 2018; BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP, Skor PPH selama tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Peningkatan skor PPH tahun 2019 sebesar 4,3 poin atau 4,7% lebih tinggi. Skor PPH di atas dihitung dengan menggunakan AKE 2000 (kkal/kap/hari). Hal ini menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Provinsi DKI Jakarta sudah lebih baik dan beragam dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Perkembangan skor PPH DKI Jakarta (AKE 2000 kkal/kap/hari) Tahun 2013-2018

No	Kelompok Pangan	Tahun						Skor PPH Ideal
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Padi-padian	25	25	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	0,4	0,5	0,7	0,8	1,1	0,9	2,5
3	Pangan Hewani	24	24	24	24	24	24	24
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	5	5	5	5
5	Buah/Biji Berminyak	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,5	1
6	Kacang-Kacangan	7,2	7,2	5,4	5,6	6,3	7,2	10
7	Gula	1,5	1,5	1,5	1,9	1,8	1,9	2,5
8	Sayur dan Buah	21,5	24,3	21,8	21,2	22,9	26,3	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		84	85	88,1	83,7	86,5	90,8	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 Persentase Ketersediaan Pangan tercapai 100%, sedangkan Skor Pola Pangan Harapan untuk tahun 2019 adalah 88,3. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 83,7 dan tahun 2018 sebesar 86,5.

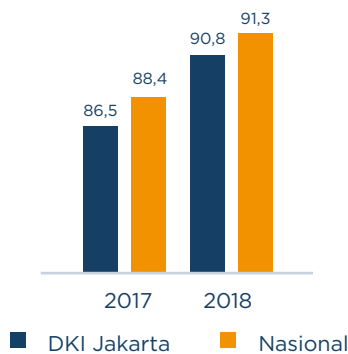
Skor Pola Pangan Harapan

+ 4,3 poin ▲ 4,7%

86,5 → 90,8

Untuk Indeks Ketahanan Pangan Nasional, berdasarkan Susenas tahun 2015 - 2018; BPS dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP realisasi Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018 adalah 91,3. Sedangkan untuk proyeksi tahun 2019 berdasarkan data dasar Susenas 2014, BPS; diolah BKP dengan sasaran skor PPH 92.5 pada tahun 2019 (Perpres No. 5 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019); dengan asumsi tidak ada perubahan pola konsumsi pangan.

Perbandingan Skor PPH DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2017-2018



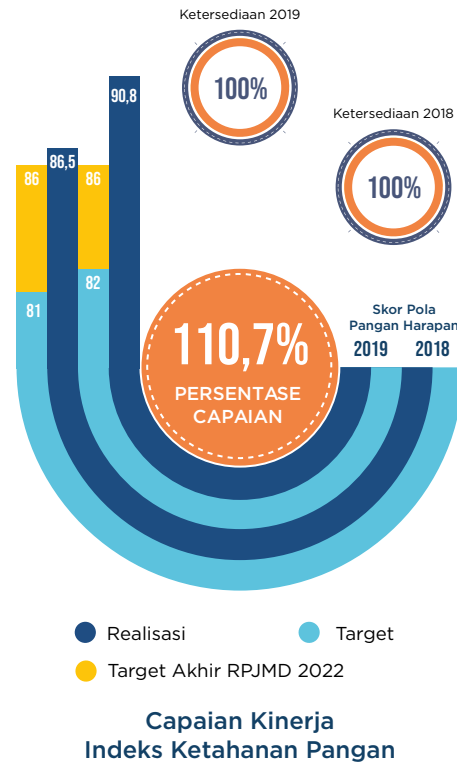
Dalam merealisasikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mempunyai program pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Ketahanan Pangan yaitu:

Program Pendukung:

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
- Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Total Anggaran yang Digunakan

341 Miliar Rupiah



Permasalahan:

Pola konsumsi pangan penduduk di DKI Jakarta cukup beragam. Namun, masih dikategorikan belum memenuhi standar ideal keberagaman pangan karena masih terdapat pangan yang belum memenuhi standar ideal. Pola Pangan Harapan meliputi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Upaya yang Dilakukan:

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai standar ideal PPH meliputi;

1. Menurunkan konsumsi beras,
2. Meningkatkan konsumsi aneka umbi-umbian sebagai substitusi tepung terigu,
3. Melakukan penerapan pengolahan umbi-umbian menjadi aneka produk seperti mie, cake, kue basah, kue kering dan lain-lain untuk menciptakan pasar pangan lokal umbi-umbian,
4. Meningkatkan konsumsi kacang-kacangan dan olahannya seperti kacang tanah, kacang hijau dan kacang merah,
5. Meningkatkan konsumsi buah,
6. Mempertahankan konsumsi sayuran.

Memperhatikan permasalahan dan alternatif solusi serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil analisis perbandingan realisasi terhadap capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa dari sasaran program dengan indikator kinerja, semua indikator sudah mencapai target dengan kriteria capaian sangat baik. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana.



Sumber Gambar: Unsplash

SASARAN 4

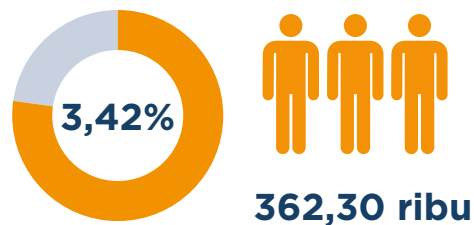
Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan Bagi Seluruh Masyarakat

Tingkat Kemiskinan

Secara Nasional, tingkat kemiskinan DKI Jakarta adalah yang terendah diantara 34 provinsi di Indonesia. Persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada September 2019 adalah 3,42 persen atau sejumlah 362,30 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2019 (3,47% atau 365,55 ribu orang), jumlah penduduk miskin berkurang 3,25 ribu orang atau turun 0,05 persen poin. Dan dibandingkan dengan periode September 2018 (3,55 % atau 372,26 ribu orang), persentase penduduk miskin turun 0,12 persen poin atau berkurang 9,97 ribu orang.

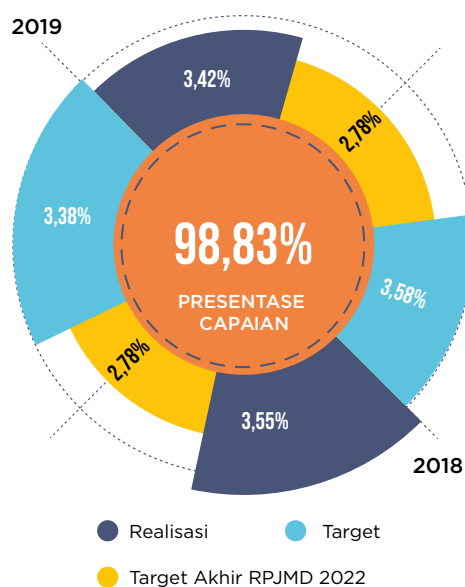
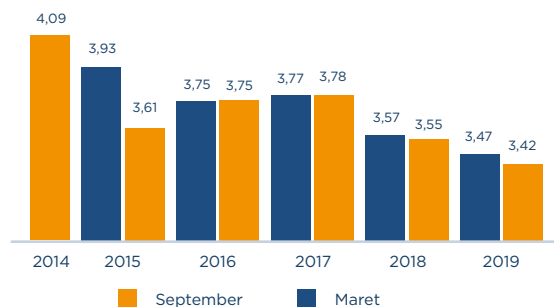
Indikator Tingkat Kemiskinan merupakan indikator negatif yang nilai pencapaian semakin baik apabila angka realisasi di bawah angka target. Tingkat kemiskinan pada dasarnya merupakan indikator level provinsi yang menjadi tanggung jawab lintas SKPD. Adapun target penurunan tingkat kemiskinan pada level provinsi pada tahun 2019 sebesar 3,38% dari angka kemiskinan, sedangkan target pada September 2018 sebesar 3,55%. Berdasarkan target tersebut, pada September 2019 Dinas Sosial berhasil menurunkan angka tingkat kemiskinan menjadi 3,42% (Publikasi BPS).

Dinas Sosial dalam hal ini sebagai satu-satunya SKPD yang mencantumkan tingkat kemiskinan sebagai indikator kinerja utama pada RPJMD 2017-2022 menasar penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,06% dari 0,2% yang menjadi target tahunan provinsi hingga Tahun 2022. Adapun program/kegiatan yang menasar pengentasan kemiskinan berbasis data keluarga seperti Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bantuan sosial dalam bentuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Anak.



Persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada September 2019 adalah 3,42 persen atau sebesar 362,30 ribu orang. Angka ini adalah yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta



Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dapat terjadi dikarenakan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berhasil melaksanakan program pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 yang bertujuan meningkatkan pendapatan maupun mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin.

Program Pendukung:



Total Anggaran yang Digunakan

58,6 Miliar Rupiah

Permasalahan:

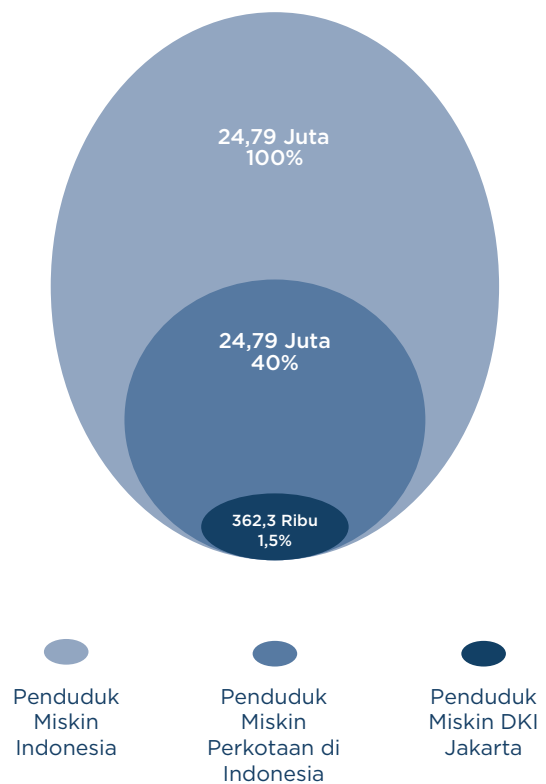
Adapun kendala perhitungan kontribusi penurunan angka kemiskinan yang belum jelas pada lintas SKPD dan tidak setaranya data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Basis Data Terpadu (BDT). Dimana data publikasi tingkat kemiskinan BPS bersifat makro yang berarti penduduk ataupun non penduduk DKI Jakarta dapat diambil sebagai sample penelitian sedangkan intervensi penurunan kemiskinan dari SKPD hanya dapat diberikan kepada warga DKI Jakarta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta.

Upaya yang Dilakukan:

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan penumbuhan usaha ekonomi produktif (UEP) dan pendampingan UEP yang telah terbentuk pada tahun - tahun sebelumnya maupun tahun 2019 dengan tujuan mencapai kemandirian, memberikan bantuan sosial untuk warga miskin dan rentan miskin khususnya para lansia terlantar di DKI Jakarta sebesar Rp.600.000,- perbulan dalam bentuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Secara nasional, Tingkat Kemiskinan Penduduk Indonesia berdasarkan data dari BPS pada september 2019 berjumlah 24,79 juta penduduk atau sebesar 9,22%. Sedangkan untuk penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 9,86 juta penduduk atau sekitar 6,56% dari jumlah penduduk perkotaan, termasuk penduduk miskin DKI Jakarta yang berjumlah 362,3 ribu penduduk.

Grafik Penduduk Miskin DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2019



SASARAN 5

Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi

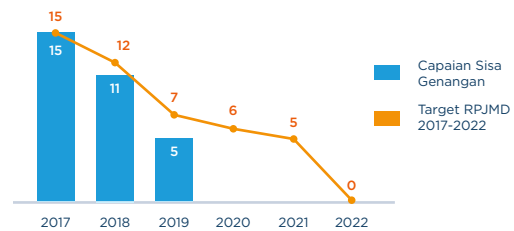
Jumlah Titik Genangan Banjir

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, kondisi awal jumlah titik genangan banjir adalah sebanyak 15 (lima belas) titik genangan yang terletak pada lokasi sebagai berikut :


1. Perempatan ITC Fatmawati
2. Komplek Paspampres Kramat Jati
3. Jl. Taman Mini 1 (Simpang Garuda)
4. Jl. DI Panjaitan
5. Jl. Patra Raya
6. Jl. Letjend. S. Parman
7. Jl. Industri/Industri 1
8. Jl. Mangga dua Raya
9. Jl. Boulevard Barat
10. Jl. Pahlawan Kalibata depan Kalibata City
11. Jl. Petogogan
12. Jl. Jl. Mayjend Sutoyo depan UKI
13. Jl. Balai Pustaka
14. Jl. Arjuna selatan
15. Jl. Plumpang Semper

Pada tahun 2019, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menurunkan jumlah titik genangan banjir menjadi 5 titik genangan. Sebelumnya, pada tahun 2018, jumlah titik genangan banjir berjumlah sebanyak 11 titik. Dari hasil capaian tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah berhasil melampaui target berkurangnya Jumlah Titik Genangan Banjir pada tahun 2019 menjadi sebanyak 7 titik genangan berdasarkan RPJMD 2017-2022. Persentase realisasi capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Jumlah Titik Genangan Banjir adalah sebesar 140%.¹


Capaian & Target Jumlah Titik Genangan Banjir




Lokasi Titik Genangan yang Berhasil Diatasi



Penanganan genangan banjir di Jalan Jl.Industri/Industri 1 melalui pengurasan dan normalisasi saluran sepanjang 98 meter.




Penanganan genangan banjir di Jalan Balai Pustaka melalui normalisasi saluran dan pemasangan *U Ditch* sepanjang 600 meter.



Penanganan genangan banjir di Perempatan ITC Fatmawati dengan membersihkan tali-tali air dan melakukan pembersihan saluran menggunakan alat berat *combi jetting*.



Penanganan genangan banjir di Jl. Plumpang Semper dengan pembersihan tali-tali air secara rutin.



Penanganan genangan banjir di Jl. Taman Mini 1 (Simpang Garuda) melalui rehabilitas dan pengurasan saluran pengubung.



Penanganan genangan banjir di Komplek Paspampres Kramat Jati oleh Satgas (Satuan Petugas) di lokasi terjadinya banjir.

¹ Indikator ini adalah indikator dengan target pengurangan jumlah titik genangan banjir, jadi cara penghitungan persentase capaian diperoleh dengan menggunakan rumus (Target Capaian/Realisasi x 100%)

Berdasarkan hasil capaian tersebut, sisa jumlah titik genangan banjir terdapat pada lokasi sebagai berikut:

- Jl. DI Panjaitan
- Jl. Mangga Dua Raya
- Jl. Boulevard Barat
- Jl. Petogogan
- Jl. Jl. Mayjend Sutoyo (Depan UKI)

Dalam merealisasikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Jumlah Titik Genangan Banjir, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai program pendukung yaitu:

Program Pendukung:



Total Anggaran yang Digunakan

2.115 Miliar Rupiah

Permasalahan/Hambatan:

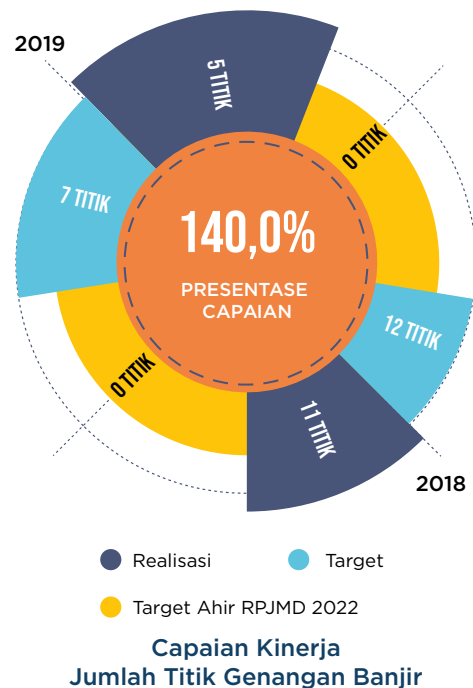
Adapun hambatan-hambatan yang secara umum masih terjadi dan perlu mendapat perhatian khususnya yang bersifat pembangunan fisik adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan tanah terkendala karena belum ditetapkannya kembali peraturan gubernur mengenai penentuan lokasi pembebasan tanah untuk kali/sungai;
2. Beberapa kegiatan pembangunan prasarana kali/sungai/waduk/Situ/ Embung tidak selesai tepat waktu dikarenakan faktor cuaca;
3. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;
4. Persiapan pelelangan kegiatan membutuhkan waktu yang lama, terutama terkait dengan lelang konsolidasi; dan
5. Penyedia barang dan jasa hasil pelelangan yang tidak kompeten sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana.

Upaya yang Dilakukan:

Sebagai upaya pemecahan masalah yang menghambat peningkatan kinerja Dinas Sumber Daya Air, maka disarankan:

1. Sosialisasi masyarakat/ instansi terkait dengan cara pendekatan dan musyawarah;
2. Proses percepatan pembebasan lahan dalam hal administratif maupun sosialisasi kepada masyarakat;
3. Proaktif menciptakan hubungan koordinatif dengan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan bidang sda; dan
4. Optimalisasi keberadaan mitra kerja dinas sda untuk mendapatkan hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Sumber Daya Air,



SASARAN 6

Meningkatnya Akses Sanitasi Layak

Cakupan Pelayanan Air Bersih

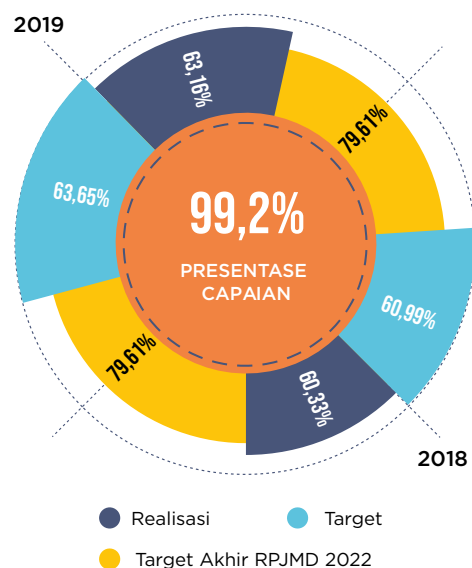
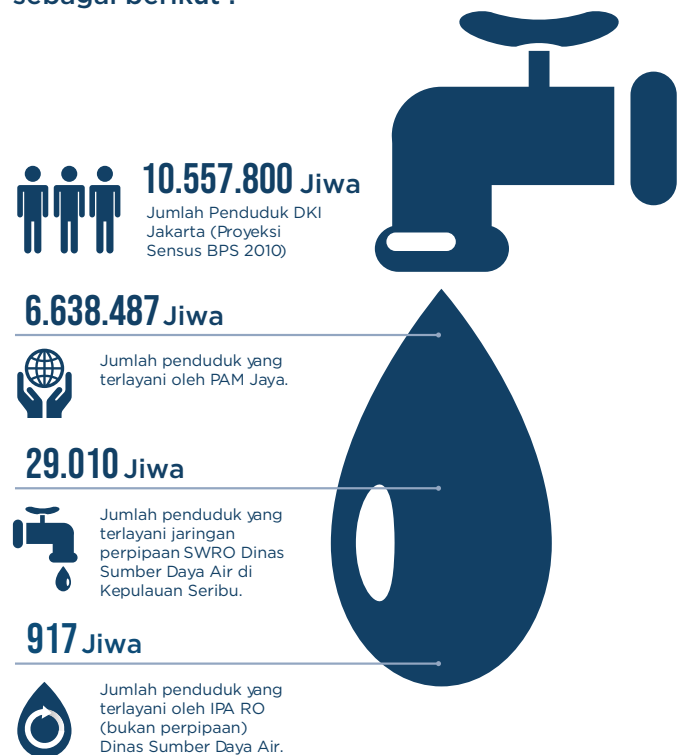
Produksi Air bersih pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 Jumlah Total 10,257,958 liter/tahun. Pada tahun 2019 Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terdapat pada 5 (lima) lokasi di Bidang Air Baku, Air Bersih dan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut terdapat pada lokasi sebagai berikut:



Cakupan pelayanan air bersih adalah total dari jumlah penduduk yang terlayani PAM Jaya, perpipaan SWRO, dan IPA RO yaitu sebesar 6.668.414 jiwa dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan proyeksi sensus BPS 2010 sebesar 10,557,800 jiwa akan menghasilkan cakupan pelayanan air bersih tahun 2019 sebesar 63,16%. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan target RPJMD 2017-2022 cakupan pelayanan air bersih tahun 2019 yakni sebesar 63,65 % akan diperoleh persentase capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air dalam bidang penyediaan air bersih sebesar 99,23 %.

Cakupan Pelayanan Air Bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai berikut :



Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Air Bersih

Dalam merealisasikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Cakupan Pelayanan Air Bersih, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mempunyai program pendukung yaitu:

Program Pendukung:

Program Pengendali Banjir dan Abrasi

Total Anggaran yang Digunakan

70,77 Miliar Rupiah

Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan dalam melaksanakan program tersebut agar terlaksana dan dapat mencapai target sebagai berikut.

Permasalahan/Hambatan:

1. Pada pembebasan tanah terdapat kendala karena belum ditetapkannya kembali peraturan gubernur mengenai penentuan lokasi pembebasan tanah untuk prasarana sungai.
2. Faktor cuaca dan padatnya lalu lintas menghambat pelaksanaan fisik.
3. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
4. Persiapan pelelangan kegiatan membutuhkan waktu yang lama, terutama yang terksit dengan lelang kondolidasi,
5. Penyedia barang/jasa hasil pelelangan yabg tidak kompeyen sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai rencana,

Upaya yang perlu dilakukan:

1. Sosialisasi masyarakat/instansi terkait dengan cara pendekatan dan musyawarah.
2. Proses Percepatan pembebasan lahan dalam hal administratif maupun sosialisasi kepada masyarakat.
3. Proaktif menciptakan hubungan koordinatif dengan instansi-instansi

- terkait dalam pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air.
4. Optimaliasi keberadaan mitra kerja Dinas Sumber Daya Air untuk mendapatkan hasil akhir pekerjaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan bidang sumber daya air.



Penurunan Volume Sampah di Kota

Indikator Kinerja Utama (IKU) Penurunan Volume Sampah di Kota memiliki target pada tahun 2019 sebesar 17% terealisasi sebesar 17,08% sehingga presentase capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100,5%. Sedangkan capaian pada tahun 2018 memiliki target sebesar 14% dengan realisasi sebesar 12,40% dengan presentase capaian sebesar 88,57%. Perbandingan presentase capaian kinerja antara tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu peningkatan target dengan hasil mencapai target.

Indikator ini ditentukan dari (jumlah timbulan sampah – jumlah sampah di TPST) / timbulan sampah x 100%. Berikut cara perhitungan pada indikator kinerja “Penurunan Volume Sampah di Kota” dapat dilihat pada tabel berikut:

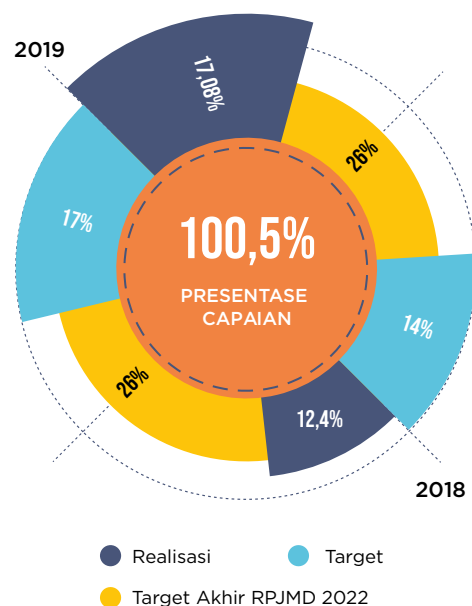
Tabel Perhitungan Presentase Penurunan Volume Sampah di Kota

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Estimasi timbulan sampah DKI Jakarta tahun 2019 (a)	3.026.511,48 ton/tahun	Sesuai dengan Jakstrada
2	Sampah yang diangkut ke TPST Bantargebang tahun 2019 (b)	2.510.296,05 ton/tahun	
3	Total pengurangan sampah tahun 2019 (c=a-b)	516.215,43 ton/tahun	
4	% pengurangan sampah tahun 2019 (c/a*100%)	17,08%	

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa langkah Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya adalah:

1. Menyusun Peraturan Gubernur Provinsi DKI tentang Kewajiban Penggunaan Kantor Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019 dengan Nomor 142 Tahun 2019.

2. Membuat program Sampah Tanggung Jawab Bersama (Samtama) dalam rangka mengubah perilaku warga dalam pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah di sumber.
3. Pengawasan Pembatasan Penggunaan Plastik dan Styrofoam yang dilakukan oleh Sudin Lingkungan Hidup di wilayah DKI Jakarta dengan tujuan mengawasi pembatasan penggunaan plastik dan styrofoam (busa polystyrene) yang digunakan oleh masyarakat Jakarta serta mencegah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan bahan pencemar tersebut.
4. Pembinaan dan pengembangan Bank Sampah, dilakukan oleh Dinas dan Sudin Lingkungan Hidup 6 (enam) wilayah, bertujuan meningkatkan kualitas SDM para pengelola/pengurus bank sampah sehingga pengurangan sampah dari sumber melalui Bank Sampah dapat meningkat.



Capaian Kinerja Penurunan Volume Sampah di Kota

Dalam merealisasikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Penurunan Volume Sampah di Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mempunyai program pendukung yaitu:

Program Pendukung:

Program Pengelolaan Persampahan

Total Anggaran yang Digunakan

1.673 Miliar Rupiah

Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan dalam melaksanakan program tersebut agar terlaksana dan dapat mencapai target adalah sebagai berikut:

Permasalahan/Hambatan:

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan program terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penurunan Volume Sampah Di Kota adalah proses pembangunan TPS 3R di wilayah kota administrasi masih belum optimal, dikarenakan masih sulitnya lahan untuk dijadikan lokasi TPS 3R.

Upaya yang perlu dilakukan:

Upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah berkoordinasi dengan aparat terkait mengenai lahan yang bisa dijadikan lokasi pembangunan TPS 3R.

SASARAN 7

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau

Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (*Public Transportation Modal Share*)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (*Public Transportation Modal Share*) memiliki target capaian sebesar 22%. Hasil tersebut didapatkan dari membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari.

Pada tahun 2019, hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai 21,7% atau 98,6% dari target. Meskipun tidak mencapai target, tetapi terdapat peningkatan dari target periode sebelumnya. Faktor tidak tercapainya target salah satunya karena meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang sangat signifikan sehingga peluang untuk menggunakan kendaraan pribadi sebagai mobilitas sehari-hari cukup tinggi.

Pemilihan Moda Transportasi Seseorang, Terbagi Menjadi Dua Golongan, yaitu:

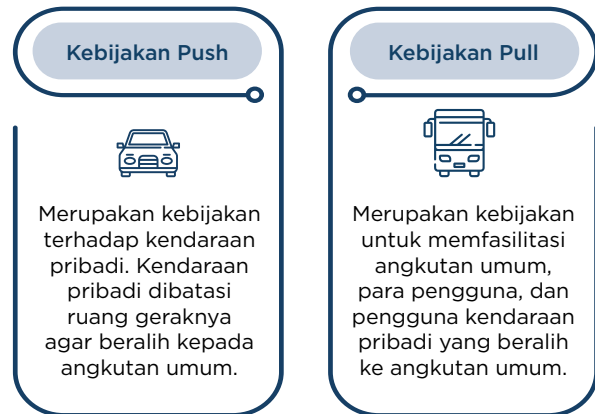
Golongan Terpaksa (*captive*)

Golongan masyarakat yang terpaksa menggunakan angkutan umum karena tidak memiliki kendaraan pribadi atau tidak bisa mengendarai kendaraan.

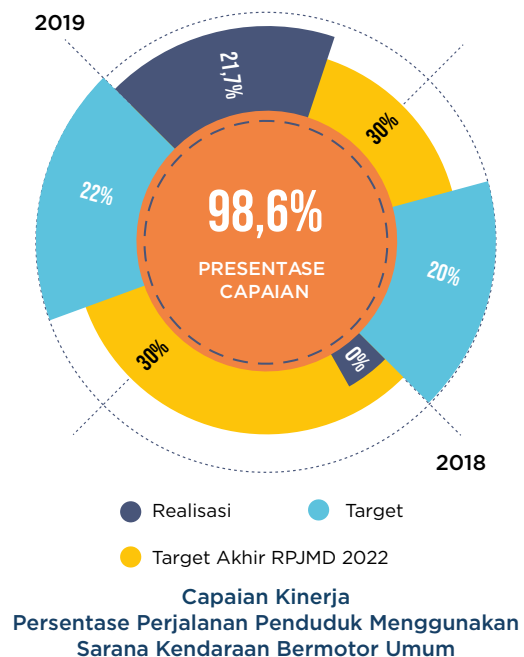
Golongan Memilih (*choice*)

Golongan masyarakat yang dapat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Secara ekonomi adalah masyarakat lapisan menengah ke atas (ekonomi kuat).

Dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, maka akan semakin banyak golongan memilih (*choice*). Peran Dinas Perhubungan adalah membuat kebijakan. Kebijakan yang dimaksud terangkum dalam *Transport Demand Management* yang terdiri dari kebijakan push dan pull.



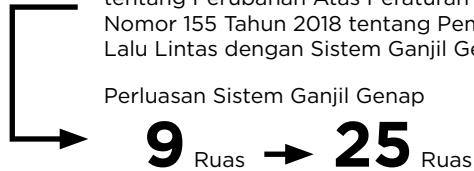
Perbandingan data antara tahun 2018 dengan tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun 2018 calon penyedia/konsultan hasil seleksi belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan TOR/KAK yang diusulkan saat pelelangan, sehingga realisasi capaian indikator kinerja utama tersebut tidak dapat diketahui hasilnya.



Penerapan Kebijakan *Push & Pull* pada tahun 2019, antara lain:

Perluasan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap



Implikasi dari kebijakan sistem ganjil genap, meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum, meningkatkan kecepatan, dan meningkatkan kualitas udara. Kebijakan sistem ganjil genap memiliki kelemahan diantaranya mendorong masyarakat untuk menambah kembali kepemilikan kendaraan pribadi dengan plat nomor ganjil dan plat nomor genap.

Nantinya, kebijakan pengendalian lalu lintas jalan berbayar elektronik (*Electronic Road Pricing*) akan menggantikan kebijakan pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap. Rencana penerapan ERP akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

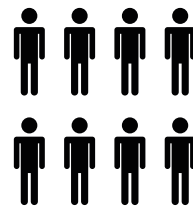
Pengoperasian MRT dan LRT Jakarta



Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase 1



Jumlah Penumpang



Per 18 Desember 2019

22,39 Juta

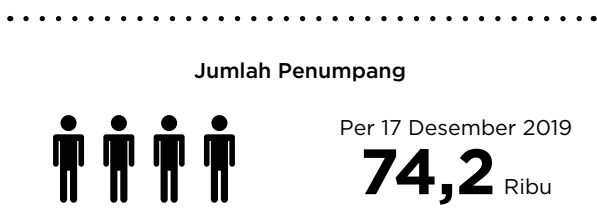
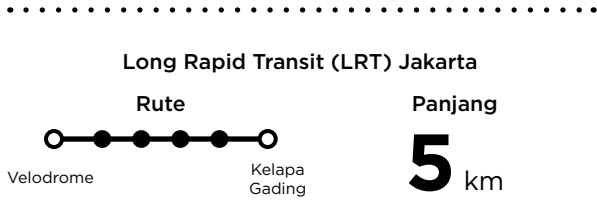
Rata-rata Per Hari

94 Ribu

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta beroperasi mulai 1 April 2019 dengan jam operasional dari 05.00 - 24.00 WIB. Jumlah penumpang MRT Jakarta diakumulasikan dari jumlah penumpang sejak pertama beroperasi pada April 2019, bahkan jumlah harian pernah melewati 108.000 per hari. Capaian tersebut melewati target 65.000 penumpang per hari. Peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta ini tak lepas dari pergeseran masyarakat urban terhadap transportasi modern. Terlebih, MRT menawarkan kemudahan transportasi yang tepat waktu (*on-time*).

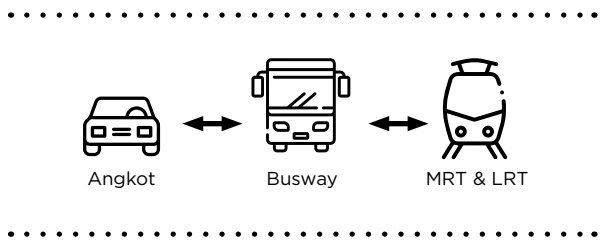
Untuk meningkatkan jumlah penumpang, selanjutnya dikembangkan *park and ride* di Kawasan Lebak Bulus, serta *Transit Oriented Development* (TOD) di kawasan stasiun, terhubungnya pusat perbelanjaan seperti di Stasiun Blok M dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya yang akan dikembangkan secara modern di Halte CSW Transjakarta koridor 13 (CBD Ciledug - Kapten Tendean) dan Stasiun MRT Asean.

Sumber Gambar: jakartamrt.co.id



LRT Jakarta mulai 1 Desember 2019 telah beroperasi untuk masyarakat umum dengan tarif flat sebesar lima ribu rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian MRT dan LRT. Selanjutnya pengembangan LRT Jakarta akan dibangun dari Kelapa Gading hingga Jakarta International Stadium (JIS), sedangkan sisi lainnya dari Velodrome hingga Manggarai. Untuk koridor 2 LRT Jakarta akan dibangun dari Pulogadung - Tanah Abang - Kebayoran Lama.

Meningkatnya Persentase Kendaraan Dan Trayek Angkutan Umum yang Terintegrasi Jak Lingko



Pemberlakuan Tarif

Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Komoditas Jasa Operator Bus Program Ok-Otrip

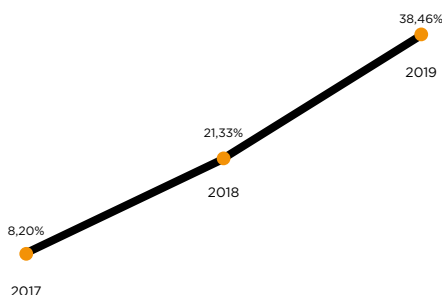
Per 3 Jam **5.000** Rupiah

Peningkatan persentase kendaraan angkutan umum yang terintegrasi akan mempermudah pengguna angkutan umum dalam beralih dari moda yang satu ke moda yang lainnya, terlebih lagi dengan keterjangkauan biaya transportasi dengan diberlakukannya kebijakan Jak Lingko, sehingga jumlah penumpang angkutan umum dapat meningkat.

Jak Lingko adalah transformasi dari OK Otrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi (integrasi rute, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran) dimana integrasi layanan transportasi publik di Jakarta yang semakin luas. Integrasi ini tidak hanya melibatkan integrasi antara bus besar dan bus kecil di Transjakarta tetapi juga nantinya akan melibatkan transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti: MRT, LRT, dan sebagainya.



Pencapaian Trayek yang Menerapkan Program Jak Lingko



Hasil dari penerapan Jak lingko secara nyata adalah meningkatnya jumlah penumpang secara signifikan. Komite *Sustainable Transport Award* (STA) secara resmi menganugerahi Jakarta sebagai “*Honorable Mention*” di ajang *Sustainable Transport Award* 2020 yang diumumkan di Fortaleza, Brazil bulan Juni 2019 silam. Penghargaan ini diberikan atas usahanya dalam mengembangkan sistem BRT, Transjakarta, serta keberhasilan dalam menaikkan jumlah penumpang hingga 200% dalam waktu kurang dari 3 tahun.

Selain kenaikan jumlah penumpang Transjakarta yang fantastis, Jakarta juga dinilai berhasil mengintegrasikan sistem BRT dengan layanan mikrobus (angkot) serta kehadiran sistem metro (MRT) pertama yang memberikan tambahan opsi moda angkutan umum bagi warga Jakarta. Jakarta juga berhasil meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan akses menuju stasiun dan halte angkutan umum serta menciptakan hub-hub untuk mengintegrasikan pelbagai moda.

Jak Lingko

JakLingko adalah program Pemprov DKI Jakarta yang dikelola PT Transjakarta, dengan menerapkan biaya maksimal Rp 5000,- dalam durasi 3 jam mulai tap in pertama sampai tap out terakhir.



Dalam merealisasikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (*Public Transportation Modal Share*), Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mempunyai program pendukung yaitu:

Program Pendukung

- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan
- Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Total Anggaran yang Digunakan

267 Miliar Rupiah

Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan dalam melaksanakan program tersebut agar terlaksana dan dapat mencapai target adalah sebagai berikut:

Permasalahan/Hambatan:

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan program adalah meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang signifikan sehingga peluang untuk menggunakan kendaraan pribadi sebagai mobilitas sehari-hari semakin tinggi.

Upaya yang perlu dilakukan:

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melakukan penerapan kebijakan pengendalian jumlah kendaraan bermotor pribadi yang ada di jalan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan.

SASARAN 8

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Realisasi Nilai Investasi

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi mempunyai satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Realisasi Nilai Investasi. Indikator Kinerja ini terdapat pada dua perangkat daerah yaitu:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
2. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi pada tahun 2019 mempunyai target sebesar Rp 100,2 Triliun dan telah tercapai sebesar Rp 123,09 Triliun atau sebesar 123,7 persen. Capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari Rp 114,2 Triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5 persen.

Indikator ini merupakan indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Realisasi Nilai investasi pada tahun 2019 dikategorikan berhasil. Karena selain mencapai target yang diharapkan, kondisi perekonomian telah stabil pasca pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif.

Optimalnya pencapaian realisasi kinerja tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;

- Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan;
- Meningkatnya kinerja BUMD dalam menjalankan aksi korporasi sehingga berdampak pada kenaikan laba/keuntungan perusahaan;
- Berjalannya proses pembinaan yang dilakukan oleh BP BUMD diantaranya melalui ditetapkannya *Key Performance Indicator* (KPI) untuk masing-masing pengurus dan corporate BUMD;
- Berjalannya seluruh kegiatan BP BUMD yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2019;
- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal;
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online.

Adapun program-program yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah,

Program Pendukung:

Program Peningkatan Penanaman Modal

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD

Total Anggaran yang Digunakan

10,7 Miliar Rupiah

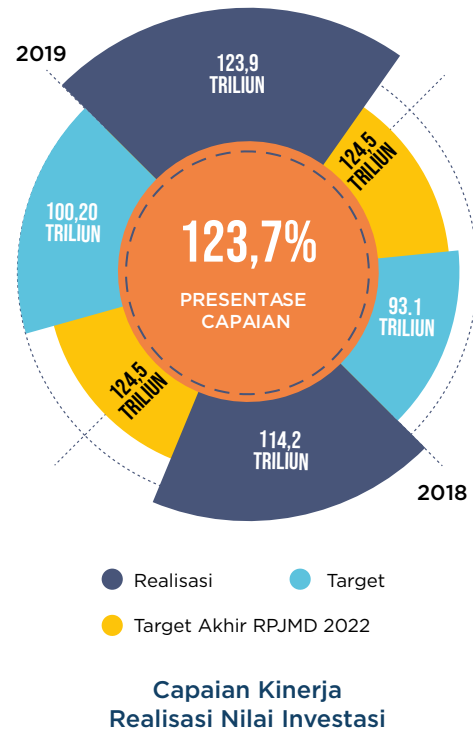
Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan dalam melaksanakan program tersebut agar terlaksana dan mencapai target adalah sebagai berikut:

Permasalahan/Hambatan:

1. Kebijakan penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang belum terintegrasi dengan sistem informasi pelayanan ijin di daerah (JAKEVO).
2. Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
3. Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *Ease of Doing Business* (EODB).
4. Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.
5. Adanya kebijakan TAPD untuk melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan sehingga mengurangi target output pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang Dilakukan:

1. Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan antara lain dengan melakukan koordinasi teknis dengan Tim Teknis OSS di Kemenko Perekonomian agar sistem OSS dan JAKEVO dapat terintegrasi dengan baik.
2. Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (*awareness campaign*, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum.
4. Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
5. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang diberikan oleh TAPD.



SASARAN 9

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

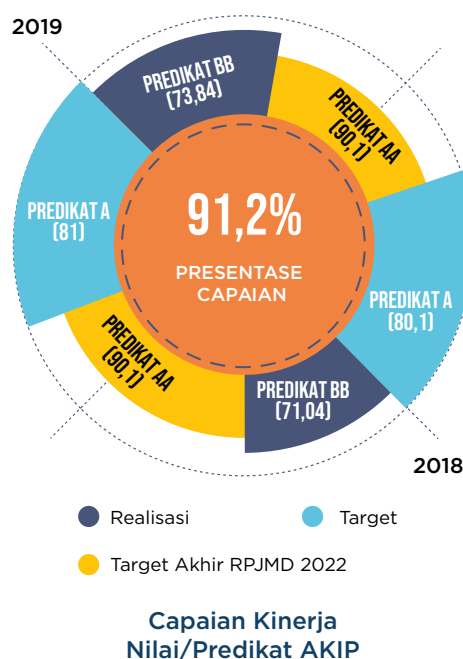
Agenda Reformasi Birokrasi digalangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Perpres RI No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan beberapa kriteria yaitu: adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN, pelayanan publik yang maksimal, kenetralan, sejahtera, berdedikasi tinggi, dan memegang teguh nilai dan kode etik aparatur negara secara mendasar pada lingkup hukum, tata kelola pemerintahan, sumber daya aparatur sipil negara, pelayanan publik, akuntabilitas, pengawasan, budaya organisasi, serta perubahan pola pikir (mindset) secara mendasar.

Pada Indikator Kinerja Utama Penilaian AKIP diukur berdasarkan nilai capaian keberhasilan penerapan kriteria Reformasi Birokrasi berkelanjutan seperti; performa sistem administrasi lembaga, budaya kinerja, akuntabilitas, praktik pelayanan publik yang dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pendukung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan budaya kinerja yang konsisten secara formal berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1180 Tahun 2019 yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja. Indikator Nilai/Predikat AKIP dapat menggambarkan capaian sasaran yang diwujudkan dalam program-program yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Selama satu tahun periode Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak

tiga program utama, dua puluh satu kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 mencakup satu sasaran strategis, empat indikator kinerja dan satu program. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat dari tahun sebelumnya dilihat dari jumlah program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target sasaran.

Hasil evaluasi kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai total 73,84 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemprov DKI Jakarta sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.



Pada Indikator kinerja nilai predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov DKI Jakarta, target predikat A dengan nilai 80,1 yang ditetapkan tidak dapat dicapai sepenuhnya. Realisasi hanya memperoleh nilai 73,84 dengan predikat BB dengan presentase capaian yang diperoleh adalah 92,18%. Namun, telah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target, dan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan, mengembangkan, menyelesaikan aplikasi e-SAKIP, menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan kinerja, serta mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait dengan kinerja daerah sampai dengan individual dalam rangka peningkatan kualitas pemerintah daerah, dengan harapan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti seluruhnya, sehingga predikat A akan dapat diraih tahun 2020.

Adapun komponen-komponen yang dinilai adalah, sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 diasumsikan mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini mengacu pada dilaksanakannya program-program yang mendukung IKU tersebut. Adapun program pendukung serta besaran anggaran yang digunakan dan masalah serta upaya dalam melaksanakan program adalah:

Program Pendukung

Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Total Anggaran yang Digunakan

23 Miliar Rupiah

Permasalahan/Hambatan:

1. Komitmen yang masih dirasa kurang dari pimpinan perangkat daerah, sehingga menyulitkan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dan dalam pemenuhan dokumen/data/informasi yang dibutuhkan pada saat proses evaluasi implementasi SAKIP SKPD.
2. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran yang masih kurang dalam pengendaliannya, sehingga menyebabkan adanya proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Persepsi yang berbeda antara tim penyelenggara SAKIP, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengambilan keputusan. Masih kurangnya pemahaman dari perangkat daerah atas manajemen kinerja dan melakukan cascading kinerja.

Upaya yang Dilakukan:

1. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan perangkat daerah dengan menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja dan penerapan SAKIP.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bersinergi dalam pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pemahaman yang intensif kepada perangkat daerah pentingnya kendali secara berjenjang di instansinya dalam proses perencanaan penganggaran.
3. Meningkatkan pemahaman atas manajemen kinerja dan penerapan SAKIP kepada Tim penyelenggara SAKIP, sehingga dapat bersinergi terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN & RB.
4. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan diberikan pemahaman yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen kinerja.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja Biro ORB Provinsi DKI dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan, baik dari tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan, maupun Kelurahan. Total pusat layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 307 layanan, yang terdiri dari 1 Dinas, 5 unit kota, 42 layanan kecamatan dan 259 unit kelurahan. Survey menggunakan metode wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured questionnaire).

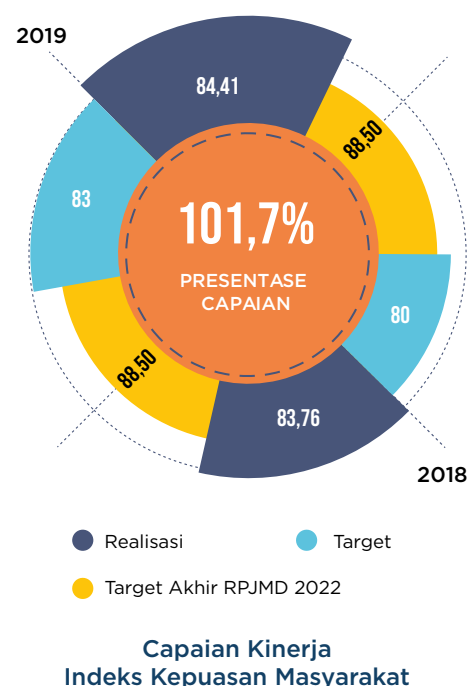
Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017. Terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan,
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan,
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian,
4. Kesesuaian Biaya,
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan),
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,

7. Sikap SETIA
8. Kualitas sarana dan prasarana dan
9. Kecukupan / keefektifan sarana informasi/pengaduan

Jawaban yang diterima dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya.

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 sebesar 84,41 dari target sebesar 83. Hal ini menandakan target tercapai sebesar 101,70% dan masuk ke dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan sebesar 3% yakni dari 83,76 pada tahun 2018 menjadi 84,41 pada tahun 2019. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 88,50, maka capaian indikator ini telah tercapai 101,7%.



Hasil capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program-program yang mendukung IKU tersebut. Adapun program pendukung dan besaran anggaran yang digunakan adalah:

Program Pendukung:

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Total Anggaran yang Digunakan

86,1 Juta Rupiah

Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan dalam melaksanakan program tersebut agar terlaksana dan mencapai target adalah sebagai berikut:

Permasalahan/Hambatan:

1. Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat masih dilakukan secara manual dengan tetap berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Adanya efisiensi anggaran di beberapa Perangkat Daerah yang berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak optimal.

Upaya yang Dilakukan:

1. Perlu disiapkan suatu sistem aplikasi yang dapat digunakan oleh semua Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Perangkat Daerah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri dan swadaya.

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

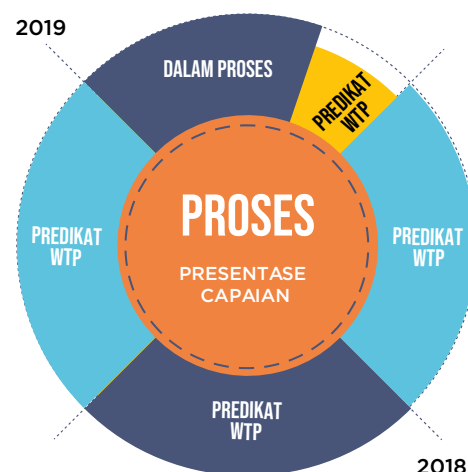
Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kekurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 data yang digunakan dari hasil data unreview atas laporan keuangan tahun 2019, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 07.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019 tanggal 14 Mei 2019,

bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Target kinerja Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan target Wajar Tanpa Pengecualian diasumsikan telah tercapai 100% berdasarkan berbagai upaya-upaya Inspektorat dan seluruh SKPD dan UKPD. Dalam rangka mempertahankan Opini WTP perlu adanya evaluasi atas upaya-upaya tersebut guna menyusun strategi.



**Capaian Kinerja
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berbagai upaya yang dilakukan juga efektif dalam pencapaian target yang berarti apa yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, sehingga target pun dapat dicapai. Adapun berbagai hal yang tercapai yaitu :

1. Penguatan komitmen pimpinan SKPD/UKPD dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyusunan dan implementasi peraturan/regulasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta konsisten disetiap lini birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif;
4. Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabel dengan melakukan mekanisme penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan tepat waktu;

Hasil capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 diasumsikan mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini mengacu pada dilaksanakannya program-program yang mendukung IKU tersebut. Adapun program pendukung serta besaran anggaran yang digunakan dan masalah serta upaya dalam melaksanakan program adalah:

Program Pendukung

Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Total Anggaran yang Digunakan

2.068 Miliar Rupiah

Permasalahan/Hambatan:

1. Adanya perbedaan persepsi diantara perangkat daerah terutama pada yang menjadi tim-tim khusus, sehingga membutuhkan waktu yang lebihlama dalam pengambilan keputusan.
2. Data / dokumen dari perangkat daerah yang membutuhkan waktu lama dalam mendapatkannya dan informasi yang disajikan terkadang berbeda, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan konfirmasi atas sajian informasi.
3. Dalam penyelesaian TLHP BPK terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, dikarenakan hasil pemeriksaan yang sudah cukup lama, sehingga yang dikenakan sanksi atau yang harus bertanggung jawab tidak bisa dihubungi.
4. Adanya perangkat daerah yang sulit untuk melakukan percepatan penyelesaian TLHP BPK dan menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh tim-tim khusus.

Upaya yang Dilakukan:

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan opini LKPD yang WTP.
2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah, dengan harapan perangkat daerah tersebut dapat cepat dalam penyampaian data/dokumen/informasi yang dibutuhkan terutama oleh tim-tim khusus.
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya.
4. Perlu dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah.

SASARAN 10

Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi Dan Berkelanjutan, Berikut Sarana Prasarana Pendukungnya

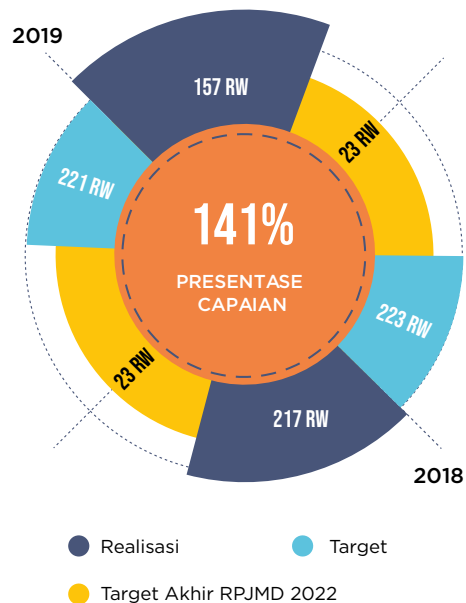
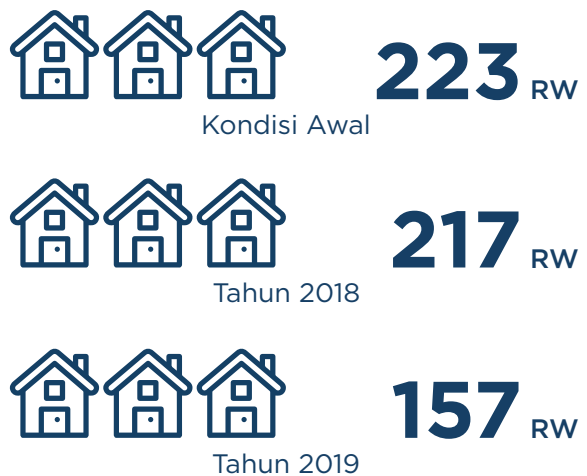
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Sasaran Strategis Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi dan Berkelanjutan, Berikut Sarana Prasarana Pendukungnya merupakan sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Sasaran tersebut mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh. Definisi operasional dari indikator kinerja tersebut adalah mengurangi kekumuhan pada kawasan tertentu. Jumlah kawasan RW kumuh yaitu terdapat sebanyak 223 RW kumuh sebagai kondisi awal dari indikator kinerja.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 telah melaksanakan penataan 6 RW kumuh dan membuat jumlah kawasan permukiman kumuh berkurang menjadi 217 RW. Pada tahun 2019 memiliki target capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh sesuai RPJMD berkurang menjadi 221 RW kumuh dengan hasil capaian kinerja berhasil menata kawasan RW kumuh sebanyak 60 RW kumuh dan mengurangi jumlah kawasan permukiman kumuh berkurang menjadi 157 RW. Adapun presentase capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2019 sebesar 141 persen dari target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) secara transparan, objektif dan relevan. Hal ini tercermin dari hasil capaian indikator kinerja yang tercapai melebihi dengan target yang diharapkan.

Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh



Capaian Kinerja Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Hasil capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun 2019 berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program-program yang mendukung IKU tersebut. Adapun program pendukung dan besaran anggaran yang digunakan adalah:

Program Pendukung:

Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

Total Anggaran yang Digunakan

234,2 Miliar Rupiah

Dalam pelaksanaan program tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendala/permasalahan dan upaya yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Permasalahan/Hambatan:

1. Proses lelang yang memakan waktu sangat lama sehingga berpengaruh terhadap target awal yang sudah ditetapkan.

2. Gagal Tender: Terjadi pada kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas dikawasan Kumuh di Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng T.A 2019 (Penataan Kawasan Permukiman Terpadu) dimana proses tender mengalami kegagalan sebanyak 2 kali.
3. Kelalaian Penyedia: Ada beberapa kegiatan dimana penyedia tidak melaksanakan pekerjaan.

Upaya yang Dilakukan:

1. Mengatur timeline proses lelang dan waktu pelaksanaan sebaik mungkin dengan berkoordinasi secara masif kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap proses lelang.
2. Dikasu gagal tender, dilakukan penunjukkan langsung agar program dapat terlaksana meskipun mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan mengalami kemunduran dari target awal yang sudah ditetapkan.
3. Diberikan Surat Peringatan ke-3 (SP-3) hingga diberikan surat pemutusan kontrak kepada penyedia jasa yang melakukan kelalaian tugas.

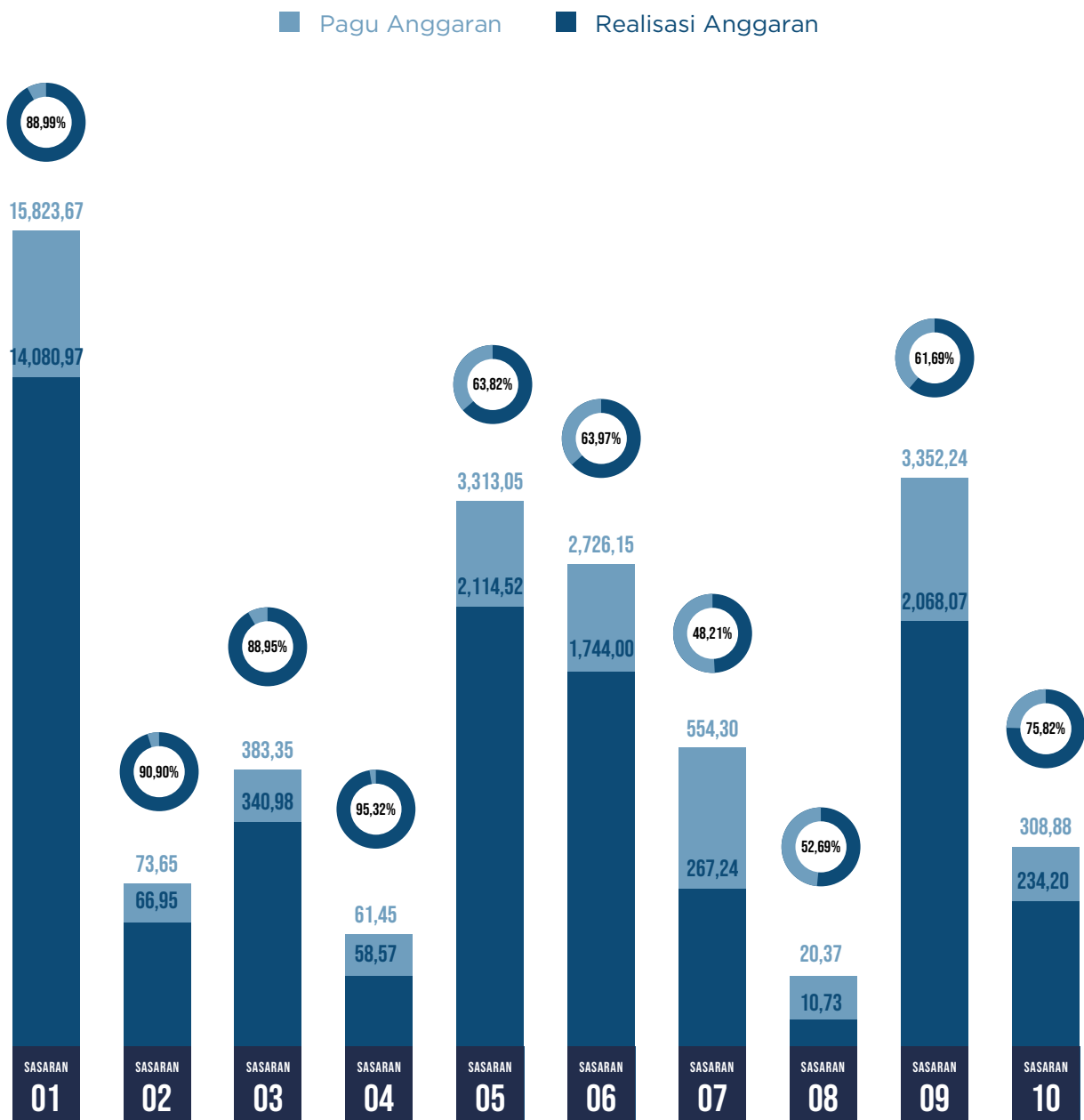


AKUNTABILITAS ANGGARAN

Secara umum, kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi target masing-masing sasaran dapat tercapai berkat dukungan pengalokasian anggaran yang baik. Dukungan pagu anggaran untuk 10 Sasaran Strategis pada tahun 2019 sebesar Rp26.617.099.640.235 (dua puluh enam triliun enam ratus tujuh belas miliar sembilan puluh sembilan

juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Pada akhir tahun 2019 anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp20.986.238.744.237 (dua puluh triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan presentase serapan anggaran sebesar 78,84%.

Grafik Realisasi Anggaran (dalam Miliar Rupiah)



ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi penggunaan anggaran didasarkan pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program-program yang dilaksanakan oleh Instansi terkait berdasarkan sisa anggaran yang tidak terserap pada setiap indikator. Anggaran dapat dikatakan efisien apabila target Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK).

Dari 10 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 7 Indikator yang memenuhi bahkan melebihi target kinerja. Adapun 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran, yaitu :

1. Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia yang terdapat pada Sasaran Strategis Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua dengan persentase capaian kinerja 100,45% dan memiliki efisiensi anggaran sebesar 11,01%. Efisiensi lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 tetapi jumlah anggaran yang diserap lebih banyak.
2. Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan yang terdapat pada Sasaran Strategis Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya Serta Terjangkau Bagi Masyarakat dengan persentase capaian kinerja 110,7% dengan efisiensi anggaran sebesar 11,06%. Efisiensi tahun 2019 lebih rendah daripada 2018, tetapi program yang dilaksanakan lebih banyak dengan anggaran yang lebih besar.
3. Indikator Kinerja Jumlah Titik Genangan Banjir yang terdapat pada Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi dengan persentase capaian kinerja 100,45% dan memiliki efisiensi anggaran sebesar 36,18%. Tahun 2018 tidak ada efisiensi, tetapi di 2019 terdapat efisiensi yang cukup tinggi dan anggaran yang digunakan lebih banyak.
4. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota yang terdapat pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Sanitasi Layak dengan persentase capaian kinerja 100,5% dan memiliki efisiensi anggaran sebesar 36,06%.

Tahun 2019 efisiensi cukup tinggi serta anggaran yang digunakan lebih banyak dibandingkan 2018 yang efisiensi anggarannya tidak berhasil.

5. Indikator Kinerja Utama Realisasi Nilai Investasi yang terdapat pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan persentase capaian kinerja 123,7% dan memiliki efisiensi anggaran sebesar 47,31%. Tahun 2019 anggaran yang digunakan lebih banyak dengan efisiensi yang tinggi meskipun tidak lebih tinggi dibandingkan 2018.
6. Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan persentase capaian kinerja 101,7% dan memiliki efisiensi anggaran sebesar 21,25%. Tahun 2019 efisiensi lebih tinggi dibandingkan 2018.
7. Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terdapat pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi dan Berkelanjutan, Berikut Sarana Prasarana Pendukungnya dengan persentase capaian kinerja 141% dan memiliki efisiensi anggaran sebesar 24,18%. Tahun 2019 terjadi efisiensi meskipun lebih rendah dibandingkan 2018, tetapi serapan anggaran lebih besar dengan capaian kinerja yang lebih baik.

Kita lihat lebih dalam terkait dengan efisiensi ini, dari sisi kualitasnya akan tampak ada perbedaan. Kualitas maksimal bisa didapatkan apabila dengan nilai efisiensi yang lebih besar bisa menghasilkan capaian dari target tiap sasaran yang lebih besar, dengan asumsi *ceteris paribus*. Kualitas efisiensi mencerminkan pelaksanaan suatu program oleh Perangkat Daerah yang dilakukan dengan perencanaan, eksekusi, dan pengawasan yang lebih baik.

Efisiensi anggaran diperoleh dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta agar mengalokasikan anggaran berdasarkan program dan kegiatan. Selain itu, efisiensi juga diperoleh dari efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program.

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran (Tahun 2018-2019)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA		2019					2018					
			2019	2018	PROGRAM	PAGU (Miliar Rupiah) A	REALISASI (Miliar Rupiah) B	SERAPAN (B/A x 100%) C	EFISIENSI (100% - C)	PROGRAM	PAGU (Miliar Rupiah) A	REALISASI (Miliar Rupiah) B	SERAPAN (B/A x 100%) C	EFISIENSI (100% - C)	
1	Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua	Indeks Pembangunan Manusia	100,45%	100,59%	DINAS PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN					
					Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	65,19	40,96	62,84%	37,16%	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	3,91	3,63	92,71%	7,29%	
					Program Wajib Belajar 12 Tahun	3030,25	2737,62	90,34%	9,66%	Program Wajib Belajar 12 Tahun	2,662,71	2,155,24	80,94%	19,06%	
					Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	23,72	19,01	80,15%	19,85%	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	6,85	5,25	76,71%	23,29%	
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan	95,61	79,90	83,57%	16,43%	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	2,52	2,09	82,79%	17,21%	
					Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1262,64	1188,09	94,10%	5,90%	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1,035,62	961,35	92,83%	7,17%	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2557,32	2205,12	86,23%	13,77%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2,172,40	1,897,30	87,34%	12,66%	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
					Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	61,39	56,01	91,23%	8,77%	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	17,21	15,44	89,68%	10,32%	
					Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	25,55	20,05	78,50%	21,50%						
					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					
					Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	1,426,18	1159,82	97,9%	2,08%	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	355,76	270,17	75,94%	24,06%	
					Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	38,04	37,25								
					DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN					DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN					
					Program Pemberdayaan Masyarakat	256,66	250	97,40%	2,60%						
					DINAS KESEHATAN					DINAS KESEHATAN					
					Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	2,938,51	2,715,30	92,40%	7,60%	Program Kesehatan Masyarakat. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	0,46	0,42	89,61%	10,39%	
					Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1,607,78	1,425,05	88,63%	11,37%	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1,682,38	1,450,29	86,20%	13,80%	
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan	1,004,65	804,94	80,12%	19,88%	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	0,32	0,31	96,05%	3,95%	
					Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1,428,61	1,340,44	93,83%	6,17%	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	0,16	0,15	90,13%	9,87%	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	1,57	1,38	88,24%	11,76%											
JUMLAH TOTAL	15,823,67	14,080,97	88,99%	11,01%	JUMLAH TOTAL	7,940,31	6,761,63	85%	14,84%						
2	Berkurangnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	99,42%	102,69%	DINAS KETENAGAKERJAAN					DINAS KETENAGAKERJAAN					
					Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	69,05	62,56	90,61%	9,39%	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1,95	1,88	96,54%	3,46%	
					Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	1,95	1,93	99,06%	0,94%	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	0,30	0,30	100,00%	0,00%	
					Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan	2,66	2,46	92,62%	7,38%	Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan perundangan di bidang ketenagakerjaan	0,04	0,04	100,00%	0,00%	
					JUMLAH TOTAL	73,65	66,95	90,90%	9,10%	JUMLAH TOTAL	2,29	2,23	97%	2,94%	
3	Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	101,22%	106,79%	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN					DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN					
					1. Ketersediaan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	67,62	62,11	91,85%	8,15%	Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat	3,85	2,84	73,90%	26,10%
					2. Skor PPH	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	152,75	134,26	87,90%	12,10%					
						Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	162,98	144,61	88,73%	11,27%					
					JUMLAH TOTAL	383,35	340,98	88,95%	11,05%	JUMLAH TOTAL	3,85	2,84	74%	26,10%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA		2019					2018						
			2019	2018	PROGRAM	PAGU (Miliar Rupiah) A	REALISASI (Miliar Rupiah) B	SERAPAN (B/A x 100%) C	EFISIENSI (100% - C)	PROGRAM	PAGU (Miliar Rupiah) A	REALISASI (Miliar Rupiah) B	SERAPAN (B/A x 100%) C	EFISIENSI (100% - C)		
4	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan Bagi Seluruh Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	98,83%	100,85%	DINAS SOSIAL					DINAS SOSIAL						
					Program Penangan Fakir Miskin	61,45	58,57	95,32%	4,68%	Program Penanganan Fakir Miskin	30,60	20,51	67,01%	32,99%		
					JUMLAH TOTAL	61,45	58,57	95,32%	4,68%	JUMLAH TOTAL	30,60	20,51	67%	32,99%		
5	Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi	Jumlah Titik Genangan Banjir	140,0%	109,09%	DINAS SUMBER DAYA AIR					DINAS SUMBER DAYA AIR						
					Program Pengendali Banjir dan Abrasi	3,313,05	2,114,52	63,82%	36,18%	Program Pengendali Banjir	6,19	6,19	100,00%	0,00%		
					JUMLAH TOTAL	3,313,05	2,114,52	63,82%	36,18%	JUMLAH TOTAL	6,19	6,19	100%	0,00%		
6	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	Cakupan Pelayanan Air Bersih	99,23%	98,92%	DINAS SUMBER DAYA AIR					DINAS SUMBER DAYA AIR						
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	109,29	70,77	64,76%	35,24%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	49,48	30,02	60,68%	39,32%					
	Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	100,47%	88,57%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
		Program Pengelolaan persampahan	2,616,86	1,673,23	63,94%	36,06%	Program pengelolaan persampahan	1,670,47	1,377,35	82,45%	17,55%					
JUMLAH TOTAL	2,726,15	1,744,00	63,97%	36,03%	JUMLAH TOTAL	1,719,96	1,407,38	82%	18,17%							
7	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau Bagi Semua Warga Jakarta	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (Transportation Modal Share)	98,64%	75,00%	DINAS PERHUBUNGAN					DINAS PERHUBUNGAN						
					Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	341,98	109,43	32,00%	68,00%	Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	73,97	60,66	82,01%	17,99%		
					Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	101,70	86,09	84,65%	15,35%	Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan dan kepelabuhan	31,80	28,11	88,38%	11,62%		
					Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	110,62	71,72	64,83%	35,17%	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	21,36	17,83	83,49%	16,51%		
					JUMLAH TOTAL	554,30	267,24	48,21%	51,79%	JUMLAH TOTAL	127,13	106,60	84%	16,15%		
8	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi Nilai Investasi	123,65%	122,66%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERBUKA SATU PINTU					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERBUKA SATU PINTU						
					Program Peningkatan Penanaman Modal	12,55	5,35	42,60%	57,40%	Program Peningkatan Penanaman Modal	7,07	3,54	50,05%	49,95%		
					BADAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH											
					Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	7,82	5,38	68,88%	31,12%							
JUMLAH TOTAL	20,37	10,73	52,69%	47,31%	JUMLAH TOTAL	7,07	3,54	50%	49,95%							
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai / Predikat AKIP	91,16%	88,80%	INSPEKTORAT					INSPEKTORAT						
					Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25,66	23,01	89,66%	10,34%	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6,90	4,66	67,54%	32,46%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,70%	102,30%	BIRO ORGANISASI REFORMASI BIROKRASI				BIRO ORGANISASI REFORMASI BIROKRASI								
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	0,11	0,09	78,75%	21,25%	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	0,02	0,02	98,37%	1,63%			
	Opini Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH								
				Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,326,47	2,044,98	61,48%	38,52%	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6,94	4,69	67,69%	32,31%			
				Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,16	2,04	94,26%	5,74%			
JUMLAH TOTAL	3,352,24	2,068,07	61,69%	38,31%	JUMLAH TOTAL	17,90	12,45	70%	30,45%							
10	Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi dan Berkelanjutan Berikut Sarana Prasarana Pendukungnya	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	140,76%	102,76%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT					DINAS PERUMAHAN RAKYAWT						
					Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	308,88	234,20	75,82%	24,18%	Program Penataan Kawasan Permukiman	39,21	9,56	24,39%	75,61%		
					JUMLAH TOTAL	308,88	234,20		24,18%	JUMLAH TOTAL	39,21	9,56	24%	75,61%		
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN ANGGARAN					26,308,22	20,752,04	78,88%	21,12%	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	9,855,29	8,323,36	84,46%	15,54%			

BAB IV





PENUTUP





KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2019 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasara target. Dari hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada setiap tujuan yang ditetapkan pada Keputusan Gubernur Nomor 1180 Tahun 2019 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.

Dari 10 (sepuluh) sasaran yang terbagi kedalam 13 (tiga belas) indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang mempunyai capaian melebihi 100%, 5 indikator diatas 80% (baik), serta 1 indikator yang masih dalam proses, namun diasumsikan dapat mencapai capaian 100% berdasarkan hasil tahun sebelumnya. Kedepannya 5 indikator kinerja yang belum tercapai 100% dapat dievaluasi melalui perbaikan-perbaikan kinerja sehingga perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi memuaskan atau sangat baik. Adapun uraian 5 indikator kinerja tersebut adalah :

1. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang terdapat pada Sasaran Kinerja Berkurangnya Tingkat Pengangguran dengan persentase capaian kinerja 99,42%. Dari hasil tersebut tinggal ditingkatkan lagi untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan keahlian dari masyarakat usia kerja.
2. Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan yang terdapat pada Sasaran Kinerja Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan Bagi Seluruh Masyarakat dengan persentase capaian kinerja 98,83%.
3. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Air Bersih yang terdapat pada Sasaran Meningkatnya Akses Sanitasi Layak terealisasi sebesar 99,23%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan PD PAM Jaya karena capaian IKU

merupakan pencapaian bersama Dinas Sumber Daya Air dengan PD PAM Jaya.

4. Indikator Kinerja Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (*Transportation Modal Share*) yang terdapat pada Sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau Bagi Semua Warga Jakarta dengan capaian kinerja sebesar 98.64%. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan penerapan kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan jumlah kendaraan bermotor pribadi yang ada di jalan.
5. Indikator Kinerja Nilai/Predikat AKIP yang terdapat pada Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan capaian kinerja sebesar 91,16%.

Pada tahun mendatang seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih optimal sehingga pada akhirnya dapat tercipta performa pelayanan publik yang berkualitas .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan kedepannya. Bagi seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, LKIP ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa mendatang.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta disusun dan dapat menggambarkan capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi DKI.



LAMPIRAN



PENGHARGAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019





Menghadiri Dan Menerima Secara Langsung Piagam Penghargaan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Dengan Kategori "Baik" Pada Tahun 2019.

09



Menerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2019 yang Diserahkan Oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan RI.

10



Menghadiri Acara Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

11



Menerima Penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 dengan Tema "Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih".

12



Menerima Penghargaan KADIN Awards Tahun 2019.

13



Penganugerahan Paramakarya Tahun 2019 Oleh Wakil Presiden RI.

14



Menerima Penghargaan Gubernur Entrepreneur Award 2019 Pada Acara Regional Leader Entrepreneur Award 2019.

15



Menghadiri Sekaligus Menerima Penghargaan HIMPAUDI Award Sebagai Gubernur Pejuang Guru Paud

16

Tabel Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Berdasarkan RPJMD Tahun 2017 - 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Bebas Konflik Sosial	1	Indeks Potensi Kerawanan Sosial	Nilai	24,97	N/A	24,95	16,25	100,00%	
2	Terwujudnya Pembangunan Kota yang Setara Gender Serta Ramah Perempuan dan Anak	2	Prevalensi kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persen	35,52	N/A	34,74	14,6	237,9%	Sangat Baik
		3	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,39	94,70	95,59	94,7	99,1%	Sangat Baik
3	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	4	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	5,28	5,69	6,08	2,32	100%	Tidak sama dengan RPJMD
4	Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Peningkatan Keberdayaan yang Berkualitas Bagi Semua	5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,00	80,47	80,40	80,76	100,4%	Sangat Baik
5	Terwujudnya Keluarga Sejahtera	6	Total Fertility Rate	Nilai	2,18	2,20	2,15	2,45	87,8%	Baik
6	Berkurangnya Tingkat Pengangguran	7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,20	5,34	5,10	5,13	99,4%	Sangat Baik
7	Meningkatnya Kewirausahaan Baru	8	Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan	Wirasaha	19.304	18.230	46.554	9.546	171,7%	Sangat Baik
8	Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya Serta Terjangkau Bagi Masyarakat	9	Indeks Ketahanan Pangan	Presentase dan Nilai	Ketersediaan 100%,Skor (PPH) 81	Ketersediaan 100%,Skor (PPH) 86,5	Ketersediaan 100%,Skor (PPH) 82	Ketersediaan 100%, Skor (PPH) 90,8	110,7%	Sangat Baik
10	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan Bagi Seluruh Masyarakat	10	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,58	3,55	3,38	3,42%	98,8%	Sangat Baik
11	Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Abrasi	11	Jumlah Titik Genangan Banjir	Titik	12	11	7	5	140%	Sangat Baik
12	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	12	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	60,99	60,33	63,65	63,16	99,2%	Sangat Baik
		13	Cakupan Pelayanan Air Limbah	Persen	15,93	21,17	17,04	16,73	98,2%	Sangat Baik
		14	Presentase Penurunan Volume Sampah di Kota	Persen	14	12,4	17	17,08	100,5%	Sangat Baik
13	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aman, Memadai, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau Bagi Semua Warga Jakarta	15	Jumlah Titik Macet	Titik	140	140	116	116	100%	Sangat Baik
		16	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (Transportation Modal Share)	Persen	20	15	22	21,7	98,6%	Sangat Baik
14	Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan Secara Aman, Handal dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Pembangunan Kota	17	Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan	Persen	0	0	0,6	0,866	144,4%	Sangat Baik
15	Tersedianya Hunian yang Layak dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	18	Jumlah Backlog Hunian	Unit	294.756	294.756	293.290	294.756	99,5%	Sangat Baik
16	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	19	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rupiah	93,10	114,20	100,20	123,90	123,7%	Sangat Baik
17	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	20	Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan Rencana	Persen	42	29	41	26	157,7%	Sangat Baik
18	Meningkatnya Kompetensi dan Iklim Kerja Aparatur	21	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	89,95	73	89,96	84,96	94,4%	Sangat Baik
		22	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standar	Persen	52	55	54	55	100,00%	Asumsi menggunakan tahun 2018. Data tahun 2019 belum rilis dari SKPD

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN	KETERANGAN
19	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	23	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	A	BB (71,04)	A	BB (73,9)	91,2%	Sangat Baik
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	83,76	83	84,41	101,7%	Sangat Baik
		25	Skor EKPPD	Nilai	3,100	3,1712	3,150	3,1712	100%	Asumsi menggunakan realisasi 2018. Data 2019 belum rilis dari SKPD
		26	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	Asumsi menggunakan realisasi 2018. Data 2019 akan rilis mei 2020
		27	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	20,00	80,40	20,00	80,4	100,00%	Asumsi menggunakan realisasi 2018. Data 2019 belum rilis dari SKPD
		28	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	68,00	70,92	73,00	74,57	102,1%	Sangat Baik
20	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel Serta Berbasis Teknologi Informasi	29	Indeks E Gov	Nilai	3,35	3,41	3,40	3,41	100%	Asumsi menggunakan realisasi 2018. Dianggap sama dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Rilis Maret 2020
21	Terbangunnya Kota yang Berwawasan Tata Ruang dan Lingkungan Sebagai Perwujudan Kota yang Berkelanjutan dan Lestari	30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	36,77	39,01	37,14	40,92	110,2%	Sangat Baik
22	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	31	Penambahan Rasio RTH	Persen	0,0665	0,072	0,035	0,033	93,4%	Sangat Baik
23	Melambatnya Penurunan Permukaan Tanah	32	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence)	Persen	4,30	1,81	4,185	1,65	100,00%	
24	Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi dan Berkelanjutan, Berikut Sarana Prasarana Pendukungnya	33	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	RW	223	217	221	157	140,8%	Sangat Baik
25	Terwujudnya Pengembangan Yang Terus Menerus Terhadap Kualitas Penelitian, Penciptaan dan Inovasi Yang Hasilnya Mudah Digunakan Oleh Masyarakat	34	Jumlah Inovasi yang Layak Diikutsertakan dalam Lomba Berskala Nasional	Inovasi	1	1	2	2	100%	Sangat Baik
26	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik Dengan Tingkat Partisipasi Politik Yang Tinggi Dalam Iklim Yang Demokratis dan Kondusif	35	Indeks Demokrasi	Nilai	73,35	85,08	73,85	84,08	113,9%	sangat Baik
27	Terwujudnya Jakarta Sebagai Kota Tujuan Wisata yang Berdaya Saing Internasional	36	Jumlah Wisatawan	Orang	38.800.000	37.005.988	41.460.000	44.342.335	107%	Sangat Baik
28	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan	37	Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru / Kreatif dan Inovatif	Event	25	38	26	26	100%	Sangat Baik
29	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	38	Jumlah Cagar Budaya yang Dikonservasi	Objek	11	18	10	18	180%	Sangat Baik

KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1180 TAHUN 2019

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ami Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1180 TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,40
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,10%
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	3,38%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Jumlah titik genangan banjir	7 titik
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Cakupan pelayanan air bersih	63,65%
		2	Persentase penurunan volume sampah di kota	17,00%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	22%
8	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Realisasi Nilai Investasi	Rp. 100,20 triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Nilai/Predikat AKIP	Predikat A
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00
		3	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	221 RW

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	94.463.838.570,00	APBD
2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	3.223.798.909.085,00	APBD
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	105.331.497.916,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.323.081.180.618,00	APBD
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.477.811.857.742,00	APBD
6	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	23.674.383.762,00	APBD
7	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	73.878.539.533,00	APBD
8	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1.668.245.947.000,00	APBD
9	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	2.913.233.413.828,00	APBD
10	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan	985.468.500.832,00	APBD
11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1.533.865.952.055,00	APBD
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	2.932.067.725,00	APBD
13	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	108.541.528.628,00	APBD
14	Program Pengendali Banjir dan Abrasi	3.237.926.535.755,00	APBD
15	Program Penataan Kawasan Permukiman	568.790.322.804,00	APBD
16	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun	34.794.803.680,00	APBD
17	Program Penanganan Fakir Miskin	63.273.184.382,00	APBD
18	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	66.163.077.215,00	APBD
19	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	1.946.740.380,00	APBD
20	Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan	2.657.813.891,00	APBD
21	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	68.564.084.021,00	APBD
22	Program Pengelolaan Persampahan	2.639.771.840.713,00	APBD
23	Program Penataan Administrasi Kependudukan	150.419.771.896,00	APBD
24	Program Pemberdayaan Masyarakat	255.109.459.831,00	APBD
25	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	345.964.650.264,00	APBD
26	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	105.060.050.085,00	APBD
27	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	134.110.701.794,00	APBD
28	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	155.060.928.362,00	APBD
29	Program Peningkatan Penanaman Modal	12.549.682.047,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
30	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.676.372.065,00	APBD
31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.676.372.065,00	APBD
32	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	40.165.476.337,00	APBD
33	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	1.087.778.686.648,00	APBD
34	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	62.327.701.499,00	APBD
35	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	28.318.433.999,00	APBD
36	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	152.294.221.841,00	APBD
37	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	164.267.510.737,00	APBD
38	Program Pengelolaan Pemakaman	437.917.650.933,00	APBD
39	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	22.868.545.980,00	APBD
40	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	25.183.520.174,00	APBD
41	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	435.550.000,00	APBD
42	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra	570.500.000,00	APBD
43	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH	200.700.000,00	APBD
44	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian	226.460.000,00	APBD
45	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.202.652.584,00	APBD
46	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.497.278.140,00	APBD
47	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	45.200.154,00	APBD
48	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan wilayah	11.627.900.889,00	APBD
49	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	246.050.094.740,00	APBD
50	Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.549.489.631,00	APBD
51	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	78.630.713.097,00	APBD
52	Program Pemanfaatan Aset Daerah	179.406.000,00	APBD
53	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	5.718.582.942,00	APBD
54	Program pembinaan dan Pengembangan BUMD	8.503.432.216,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
55	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25.659.614.221,00	APBD
56	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	150.933.700,00	APBD
57	Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual	10.689.335.463,00	APBD
58	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	12.454.630.597,00	APBD
59	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	7.271.468.287,00	APBD
60	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	58.772.477.718,00	APBD
61	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	3.328.828.862,00	APBD
62	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	190.184.405.302,00	APBD
63	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	273.300.439.185,00	APBD
64	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara	329.517.800.155,00	APBD
65	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	3.395.949.821,00	APBD
66	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	190.595.214.707,00	APBD
67	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur	317.623.759.816,00	APBD
68	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur	8.417.950.571,00	APBD
69	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur	501.177.587.843,00	APBD
70	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	5.343.689.451,00	APBD
71	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	259.278.639.871,00	APBD
72	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	397.156.158.813,00	APBD
73	Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.612.439.582,00	APBD
74	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	250.039.518.506,00	APBD
75	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	588.265.427.291,00	APBD



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

